



**CIPS**

Center for Indonesian  
Policy Studies

Makalah Diskusi

# **REFORMASI KEBIJAKAN PADA INDUSTRI UNGGAS DI INDONESIA**

oleh Carmelo Ferlito dan Hizkia Respatiadi





# **REFORMASI KEBIJAKAN PADA INDUSTRI UNGGAS DI INDONESIA**

**Oleh:**

Carmelo Ferlito

Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS), Kuala Lumpur, Malaysia  
and INTI International College Subang, Subang Jaya, Malaysia

dan

Hizkia Respatiadi

Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta, Indonesia

**Jakarta, Indonesia**

**November, 2018**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Industri unggas di Indonesia adalah sektor utama bagi perekonomian nasional, yang memasok 65% protein hewani dan mempekerjakan 10% tenaga kerja nasional. Meskipun produksi lokal berhasil memenuhi permintaan domestik, potensi pertumbuhannya tetap tinggi di seluruh Indonesia dan secara konsisten sesuai dengan ekspektasi kenaikan PDB per kapita. Hal ini menyebabkan pasar menjadi sehat serta menarik dan membuat perusahaan asing baru masuk secara berkala. Dalam sepuluh tahun terakhir, proses produksi telah berevolusi dan dimodernisasi. Pasar didominasi oleh lima pemain utama—tiga perusahaan asing yang beroperasi memproduksi pakan ternak dan dua perusahaan memproduksi anak ayam umur sehari (DOC).

Meskipun ekspektasi terhadap industri ini sangat positif, harga ayam broiler dan telur di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di Eropa dan Amerika. Dari bulan Maret–Oktober 2018, harga daging ayam broiler di Indonesia rata-rata sekitar Rp40.500/kg, sedangkan di Uni Eropa harganya sekitar Rp32.600/kg (+24%). Dalam periode yang sama, harga rata-rata telur di Indonesia adalah sekitar Rp28.000/kg, sedangkan harga telur di Uni Eropa adalah sebesar Rp21.000/kg (+33%). Perbedaan harga ini sebagian disebabkan oleh perbedaan permintaan dan penawaran—Indonesia adalah negara Muslim, jadi permintaan daging ayam lebih besar daripada di negara-negara dengan konsumsi daging babi yang lebih tinggi. Namun, yang mengejutkan adalah harga di Indonesia lebih tinggi meskipun biaya produksi lebih rendah. Upah petani di Indonesia lebih rendah daripada di Eropa. Selain itu, pada tahun 2012 Uni Eropa melarang ayam petelur yang dikandangkan. Hal ini memaksa para peternak ayam petelur untuk mengurangi kepadatan unggas dan menerapkan metode produksi yang lebih mahal, sehingga mendorong biaya produksi telur naik. Biaya produksi di Uni Eropa lebih tinggi, tetapi harga konsumen lebih rendah.

Perbedaan harga ini sebagian juga disebabkan oleh kondisi pasar umum di UE dan Indonesia. Sementara pasar Eropa adalah pasar yang matang, pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia yang didukung oleh peningkatan permintaan, menjadi elemen penting yang menyebabkan harga tetap tinggi.

Sementara banyak faktor ekonomi berada di luar kendali Indonesia, harga juga dipengaruhi oleh kebijakan publik Indonesia. Oleh karena itu, kami mengusulkan modifikasi kebijakan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri yang sehat, yang dapat disertai juga dengan harga yang lebih rendah. Tindakan penting pertama adalah menelaraskan peraturan yang ada, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 57 Tahun 2015 tentang surat rekomendasi menteri untuk impor jagung dan hak impor jagung.

Saran kedua kami, terkait dengan Permentan Nomor 26 Tahun 2016, adalah untuk membebaskan impor stok induk,<sup>1</sup> yang memungkinkan produsen unggas untuk lebih bebas menerapkan strategi kewirausahaan yang sehat daripada mengandalkan estimasi pemerintah yang salah. Pada saat yang sama, kami percaya bahwa Indonesia perlu untuk terjun ke pasar jagung internasional,

<sup>1</sup> Dalam industri unggas, "stok induk" mengacu pada ayam yang dikembangbiakkan untuk memproduksi telur yang dibuahi.

alih-alih menjalankan kebijakan perdagangan proteksionis untuk menggenjot produksi lokal. Peraturan saat ini telah mendorong harga jagung domestik menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan harga internasional. Karena jagung adalah komponen utama pakan unggas, dan pakan unggas merupakan biaya terbesar dalam produksi unggas di Indonesia, akses bebas ke pasar internasional akan secara positif sangat memengaruhi biaya produksi di industri unggas sehingga dapat membantu harga menjadi lebih rendah.

Terakhir, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memperbaiki infrastruktur, yang pada saat ini membebani industri—terutama dalam hal pengiriman bahan mentah untuk pakan ternak dari pelabuhan ke pabrik. Perbaikan infrastruktur jalan juga akan memungkinkan pengangkutan alat berat, yang selanjutnya mendorong modernisasi industri unggas.

## SITUASI SAAT INI

Industri unggas memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Menurut Asosiasi Produsen Pakan Ternak Indonesia (APPI/GPMT), sektor ini mampu memasok 65% protein hewani di Indonesia, menyediakan lapangan kerja bagi 12 juta orang, dan memiliki perkiraan nilai lebih dari USD34 miliar (Wright dan Darmawan, 2017, hlm. 2).<sup>2</sup> Diperkirakan pada tahun 2015, tingkat populasi unggas adalah sebesar 3,5 juta ayam broiler,<sup>3</sup> 200 juta ayam petelur,<sup>4</sup> dan 24,8 juta induk ayam.<sup>5</sup>

Industri unggas tersebar di seluruh Indonesia (Grafik 1), dan produksi telur yang signifikan berkembang di Jawa Timur karena terdapat ketersediaan jagung lokal dan kemudahan mengangkut telur ke pasar di Jawa Barat. Produksi ayam broiler tersebar luas di seluruh negeri tetapi terfokus di Jawa Barat (Bandung), dekat dengan pasar burung segar, yang tidak memiliki rantai dingin yang memadai (Iowa Economic Development Authority, 2017, hlm. 13).

<sup>2</sup> Total PDB Indonesia pada tahun 2017 sedikit berada di atas USD 1 triliun. Sementara pertanian menyumbang sekitar 14% dari PDB, dan mempekerjakan sekitar 32% angkatan kerja. Industri unggas yang bernilai sebesar USD 34 miliar mewakili sekitar 24% dari sektor pertanian. 12 juta pekerja di industri unggas mewakili sekitar 10% dari total angkatan kerja di Indonesia (diperkirakan pada tahun 2017 terdapat 126,1 juta pekerja).

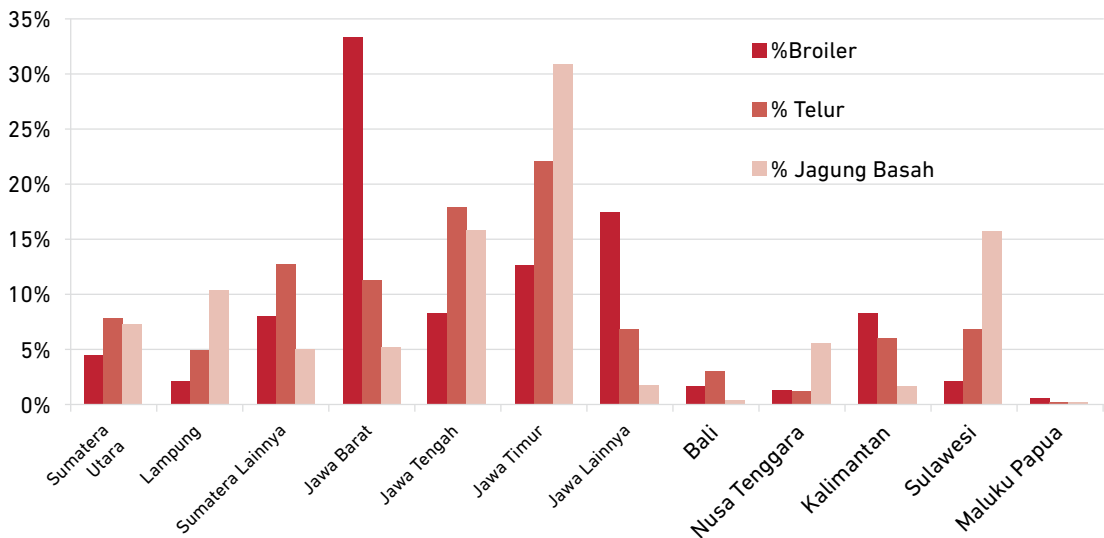
<sup>3</sup> Ayam broiler adalah ayam yang dikembangbiakkan sebagai daging unggas. Ayam jantan dan betina dibesarkan bersama karena akan disembelih sebelum ayam mencapai kedewasaan seksual. Di Indonesia, ayam broiler biasanya disembelih saat mencapai berat 1,7–2 kg. Struktur industri ayam broiler dapat dilihat pada Lampiran.

<sup>4</sup> Ayam petelur adalah ayam betina yang dikembangbiakkan untuk menghasilkan telur yang akan dikonsumsi oleh manusia. Struktur industri ayam petelur dapat dilihat pada Lampiran.

<sup>5</sup> Induk ayam adalah ayam yang dikembangbiakkan untuk menghasilkan telur yang dibuahi; berdasarkan genetika dari induk ayam, setelah telur tersebut menetas, dapat menghasilkan ayam broiler komersial, petelur, atau induk ayam lainnya.

**Grafik 1**

Produksi unggas Indonesia untuk ayam broiler, produksi telur, dan jagung basah berdasarkan wilayah.



Sumber: IOWA Economic Development Authority (2017), hlm. 13.

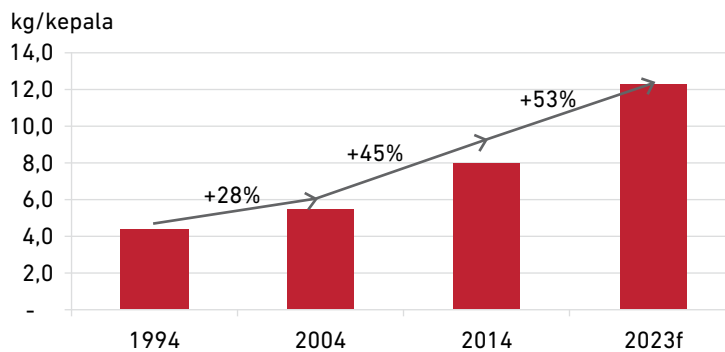
Terdapat korelasi antara produksi ayam broiler regional dan telur, serta distribusi populasi. Suhu yang tinggi, infrastruktur jalan yang buruk, dan permintaan telur segar yang tinggi membuat pengangkutan unggas hidup jarak menengah sangat sulit, sehingga permintaan harus dipenuhi di dalam wilayah tersebut saja (IOWA Economic Development Authority, 2017, hlm. 14).

Industri unggas di Indonesia telah mengalami fluktuasi siklus tetapi tumbuh secara konsisten selama tiga dekade terakhir. Grafik 2 menunjukkan korelasi positif antara pertumbuhan PDB per kapita dan konsumsi unggas per kapita.

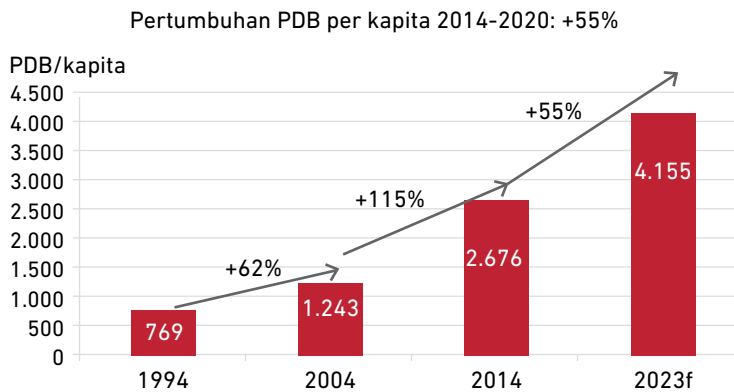
**Grafik 2**

Konsumsi unggas per kapita dan pertumbuhan PDB per kapita dari tahun 2014 hingga 2023 (prakiraan) di Indonesia.

Konsumsi unggas per kapita 2014-2023: +27%



“Ayam dianggap sebagai barang bermutu rendah, yang berarti berdasarkan margin, konsumsinya dapat menurun karena konsumen menjadi lebih kaya.”



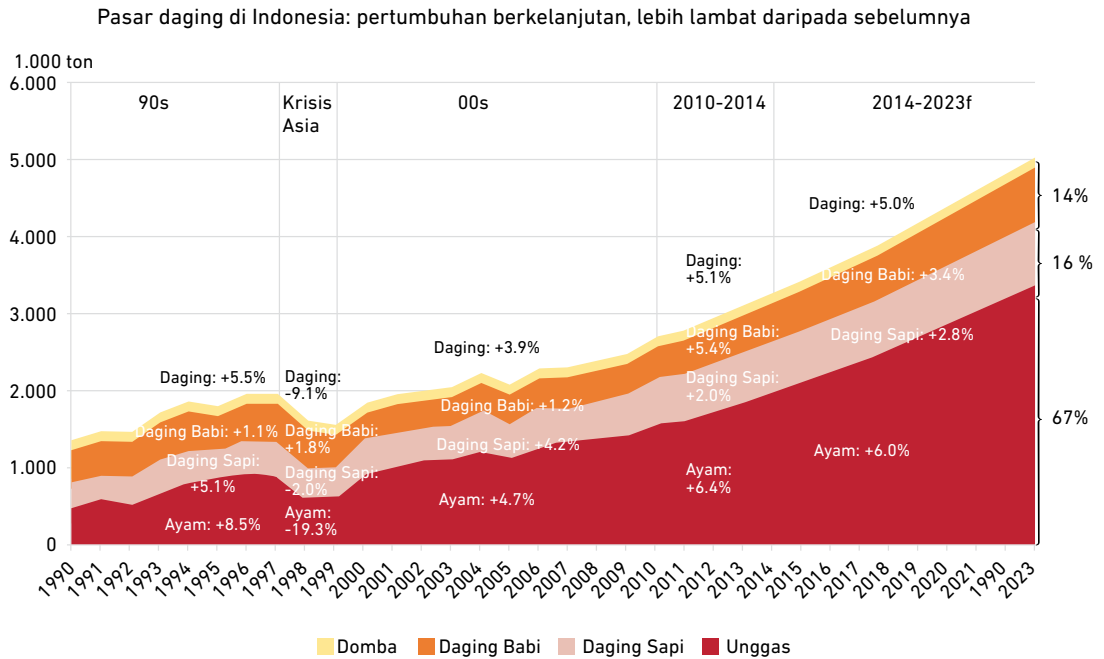
Sumber: Mulder, Kumar, dan van Horne (2015), hlm. 5.

Untuk memahami mengapa konsumsi unggas per kapita bergerak lebih lambat daripada PDB per kapita, kita harus mempertimbangkan bahwa ayam dianggap sebagai barang bermutu rendah, yang berarti berdasarkan margin, konsumsinya dapat menurun karena konsumen menjadi lebih kaya. Di luar tingkat konsumsi tertentu, konsumen beralih ke sumber protein yang lebih “bergengsi” dan mahal, seperti daging sapi.<sup>6</sup> Bagaimanapun juga, potensi pertumbuhan industri ini cukup tinggi di Indonesia. Bahkan, Malaysia dengan struktur konsumsi yang sama memiliki konsumsi ayam per kapita per tahun yang mencapai 45 kg. Konsumsi ayam per kapita di Indonesia diharapkan mencapai 12,7 kg dalam bobot karkas (CWT)<sup>7</sup> di tahun ini, yang berarti peningkatan tahunan mencapai sekitar 5%, sehingga total konsumsi adalah sebesar 3,3 juta ton CWT (3,2 juta di akhir 2017) (Mulder, 2018a, hlm. 11). Beberapa tahun yang lalu, pada tahun 2012, konsumsi per kapita tahunan hanya 7,5 kg (Wright dan Darmawan, 2017, hlm. 2). Oleh karena itu, Rabobank memperkirakan pertumbuhan industri yang kuat, meskipun lebih lambat dari sepuluh tahun terakhir (Gambar 1). Pertumbuhan pada tahun 2017 dan 2018 begitu kuat sehingga semua pemain utama merencanakan ekspansi lebih lanjut (Anonim, 2018a, hlm. 2-3).

<sup>6</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Varian (2010, hlm. 96), ketika «peningkatan hasil pendapatan mengurangi konsumsi satu [barang] [...] [s]eperti barang yang disebut barang bermutu rendah. Ini mungkin “tidak normal”, tetapi jika Anda mempertimbangkannya, barang bermutu rendah ini tidak selalu barang yang tidak biasa. Ada banyak barang yang permintaannya menurun seiring dengan peningkatan pendapatan; contohnya mungkin termasuk bubur, *bologna*, gubuk, atau hampir semua jenis barang berkualitas rendah». Ayam adalah jenis daging yang dapat menjadi protein (dari peternakan ke meja makan) dalam periode waktu tercepat; fakta ini memberikan kontribusi yang menjadikan ayam sumber protein termurah. Oleh karena itu, sangat masuk akal untuk mengasumsikan bahwa di luar pendapatan tertentu, konsumen akan beralih ke, misalnya, daging sapi atau babi, daripada meningkatkan konsumsi ayam mereka. Kondisi ini terjadi tergantung pada preferensi dan selera konsumen.

<sup>7</sup> Bobot karkas hewan. Berbeda dengan bobot hewan hidup, bobot seekor hewan sebelum disembelih.

**Gambar 1**  
Pasar daging Indonesia, 1990-2023.

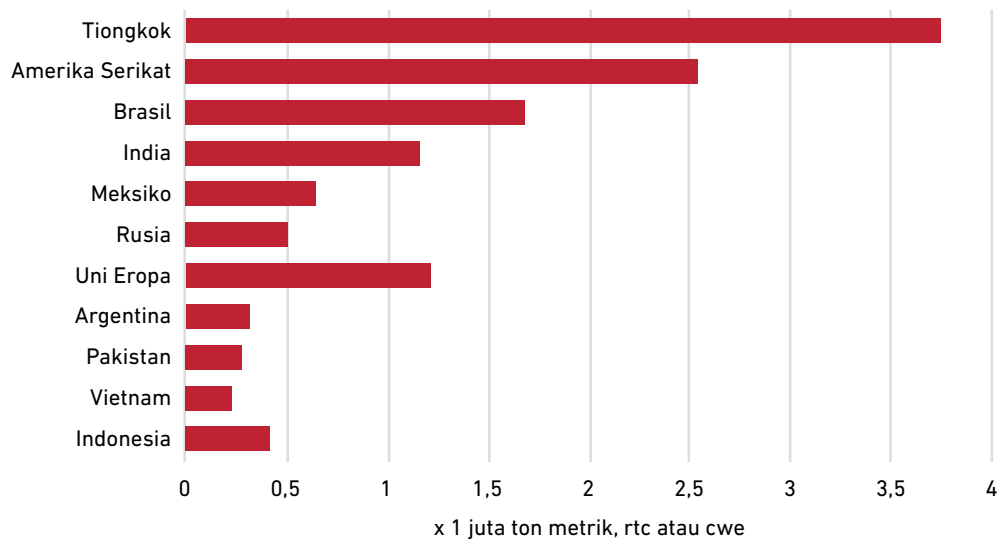


Sumber: Mulder, Kumar, dan van Horne (2015), hlm. 4.

Indonesia diharapkan memainkan peran yang semakin besar dalam produksi unggas dunia dalam dekade berikutnya, bersama dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Tiongkok, India, Pakistan, dan Vietnam. Hal ini digambarkan pada Grafik 3.

**Grafik 3**

Negara-negara dengan bagian terbesar dalam produksi unggas tambahan. Pertumbuhan dari periode dasar rata-rata tahun 2014–2016 hingga proyeksi tahun 2026.



Sumber: Conway (2017), hlm. 24. © WATT Global Media 2017.

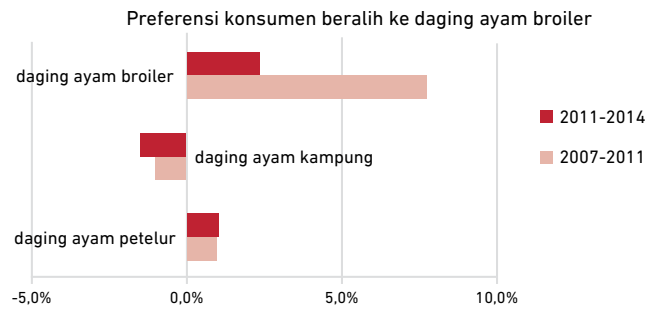
“Indonesia diharapkan memainkan peran yang semakin besar dalam produksi unggas dunia dalam dekade berikutnya, bersama dengan negara-negara Asia lainnya.”



Pertumbuhan kuantitatif ini diharapkan akan disertai dengan perubahan kualitatif yang berkelanjutan. Karena industri telah mengalami modernisasi dan konsentrasi produksi, preferensi konsumen telah secara bertahap beralih ke daging ayam broiler dan menjauhi ayam kampung<sup>8,9</sup> seperti yang ditunjukkan pada Grafik 4.<sup>10</sup>

**Grafik 4**

Preferensi konsumen Indonesia, daging ayam broiler vs ayam kampung.

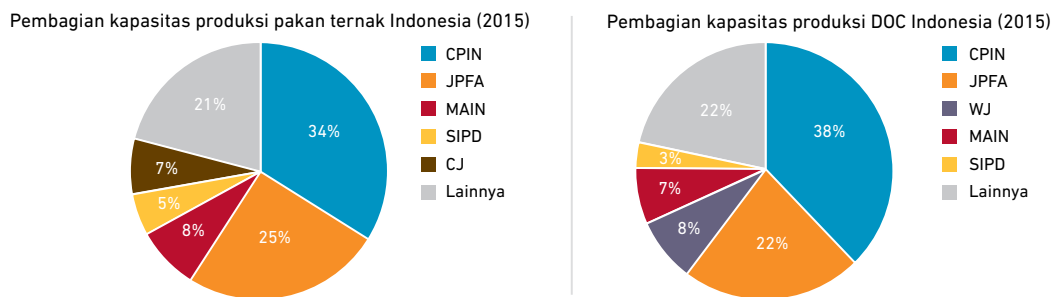


Sumber: Mulder, Kumar, dan van Horne (2015), hlm. 6.

Proses pertumbuhan telah didukung oleh modernisasi dan konsentrasi yang bertahap. Pada tahun 2017, pemain nomor satu di pasar unggas Indonesia, PT Charoen Pokphand Indonesia, mempertahankan pangsa pasar sebesar 31% dalam produksi pakan unggas dan 41% pangsa pasar dalam produksi Anak Ayam Umur Sehari (*Day-Old-Chicks/DOC*) (Partners, 2017a). Pada tahun 2015, pasar unggas dan pakan ternak di Indonesia telah terkonsolidasi, dengan 80% dan 63% dari pangsa pasar yang dilakukan oleh lima pemain teratas (Partners, 2017b).

**Gambar 2**

Bagian produksi pakan ternak dan DOC di Indonesia (2015).



Sumber: seekingalpha.com (CPIN = Charoen Pokphand Indonesia, JPFA = Japfa Comfeed,<sup>11</sup> MAIN = Malindo Feedmill, SIPD = Sierad Produce,<sup>12</sup> WJ = Wonokoyo Jaya Corporindo<sup>13</sup>).

<sup>8</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam USAID (2013, hlm. viii), ayam kampung “adalah jenis ayam yang secara khusus memproduksi daging dan telur secara bersamaan. Daging ayam kampung cenderung lebih keras daripada ayam broiler atau petelur dan ayam ini biasanya berkeliaran di lingkungan desa. Mereka memiliki daging yang lebih sedikit daripada ayam broiler dan dagingnya lebih gelap karena banyak bergerak. Jenis ayam ini lebih disukai oleh banyak pelanggan dan harga ayam kampung bisa dua kali lipat daripada ayam broiler. Perkembangbiakan ayam kampung biasanya sangat tidak resmi dan berlangsung di tingkat desa, tetapi unit pengembangbiakan ayam kampung khusus terus berkembang.”

<sup>9</sup> Ayam petelur betina adalah jenis ayam betina petelur untuk berkembang biak atau komersial yang tidak lagi berada pada tingkat produksi yang diinginkan.

<sup>10</sup> Beberapa inisiatif sekarang diterapkan untuk melestarikan beberapa varietas ayam kampung, seperti produksi ayam pelung yang beroperasi di Jawa Barat oleh Unggas Lestari Unggul (Fachrudin, 2018).

<sup>11</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang Japfa Comfeed lihat <https://www.japfacomfeed.co.id/id>.

<sup>12</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang Sierad Produce lihat [www.sieradproduce.com/](http://www.sieradproduce.com/).

<sup>13</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang Wonokoyo Jaya Corporindo lihat <http://www.wonokoyo.co.id/>.

Gambar 2 juga menunjukkan bahwa pasar Indonesia didominasi oleh pemain asing (Alonzo, 2016). Charoen Pokphand Indonesia<sup>14</sup> dimiliki oleh grup Thailand,<sup>15</sup> Malindo<sup>16</sup> adalah nama operasi lokal dari Leong Hup yang berbasis di Malaysia,<sup>17</sup> dan CJ<sup>18</sup> adalah perusahaan Korea yang menjadi bagian dari Samsung hingga 1990.<sup>19</sup> Potensi pertumbuhan pasar unggas Indonesia baru-baru ini menarik investor asing—'entri terbaru' yang paling menarik adalah Grup New Hope Tiongkok,<sup>20</sup> yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2006 di bawah nama New Hope Indonesia, dan yang terbaru adalah Bounty Fresh<sup>21</sup> dari Filipina. Bounty memasuki Indonesia pada tahun 2015 berkat kerja sama dengan Triputra Group dan Persada Capital Group, yang disebut Bounty Segar Indonesia. Pada tahun 2016, Japfa melalui anak perusahaannya So Good Food dan perusahaan agribisnis milik PT Cargill Food Investment Indonesia yang dimiliki oleh AS, setuju untuk mendirikan PT Cahaya Gunung Foods, perusahaan patungan 40/60 untuk memproduksi produk unggas yang dimasak sepenuhnya (Sulistiyono, 2016).

Kehadiran perusahaan-perusahaan besar telah memainkan peran penting yang memungkinkan Indonesia untuk mencapai tingkat modernisasi teknologi dan kemandirian pasokan yang terus meningkat. Diperkirakan bahwa 60% produksi unggas berasal dari pertanian industri (sistem perandangan tertutup), sementara 40% tetap berada di tangan pemain kecil dan menengah (sistem perandangan terbuka) (Brockotter, 2017). Di antara para pemain kecil, peran petani independen yang tidak terikat pada perusahaan unggas yang lebih besar telah menurun tajam. Menurut Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia), jumlah petani independen telah menurun dari 100.000 petani pada tahun 2008 menjadi 6.000 petani hari ini, sesuai dengan penurunan pangsa pasar petani independen dari 70% pada tahun 2008 menjadi 18% pada tahun 2016 (Wright dan Darmawan, 2017, hlm. 2).

Grafik 5 menunjukkan bahwa produksi lokal secara konsisten mampu memenuhi permintaan domestik dan bahwa perdagangan unggas internasional sebenarnya hampir tidak ada di Indonesia. Produksi daging broiler mengalami penurunan yang besar pada tahun 1997 dan 1998, tetapi masa krisis ini dapat dikaitkan dengan kesulitan ekonomi makro umum yang dialami oleh beberapa negara Asia pada periode tersebut (Saptana dan Rusastra, 2001). Selama pemulihan krisis ini pada tahun 1999, produksi tumbuh dengan cepat sebelum melambat dan kemudian stabil setelah tahun 2012 (Grafik 5).<sup>22</sup>

<sup>14</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang Charoen Pokphand di Indonesia lihat <https://cp.co.id/>. Di Indonesia, CP sebagian besar dikenal melalui merek Fiesta, yang produknya banyak ditemukan di supermarket dan minimarket.

<sup>15</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang Charoen Pokphand secara internasional lihat <http://www.cpgroupglobal.com/>.

<sup>16</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang Leong Hup di Indonesia lihat <http://www.malindofeedmill.com/>.

<sup>17</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang Leong Hup secara internasional lihat <http://www.leonghupinternational.com/>.

<sup>18</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang CJ lihat <http://www.cj.co.kr/cj-kr/>. CJ sangat aktif dalam diversifikasi bisnis; masyarakat di Asia Tenggara mengenal Tous Les Jours (<https://www.tljus.com/>), waralaba roti yang menjadi bagian dari CJ foodville, grup bisnis dari CJ Group.

<sup>19</sup> Perpisahan ini terjadi antara tahun 1993 dan 1997; lihat So-hyun, 2013.

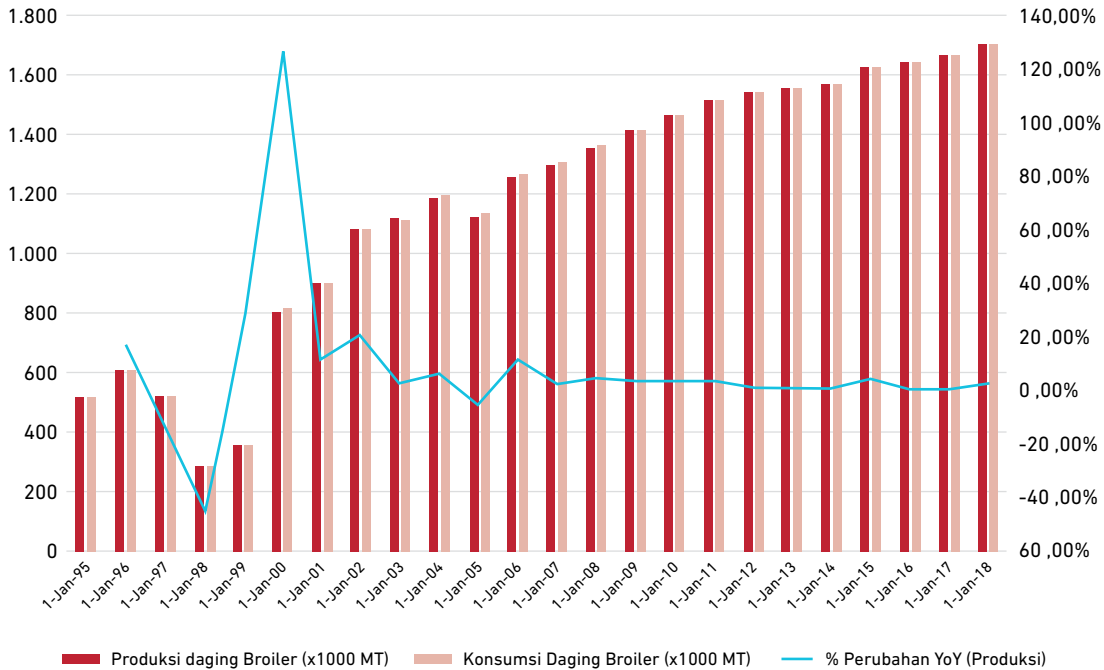
<sup>20</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang New Hope Group lihat <http://www.newhopegroup.com/>

<sup>21</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang Bounty Fresh lihat <http://www.bountyfreshchicken.com/>

<sup>22</sup> Penurunan luar biasa pada tahun 2005 khususnya disebabkan oleh wabah flu burung yang intens, yang menewaskan 100 juta unggas (Collins, 2007, hlm. 4).

**Grafik 5**

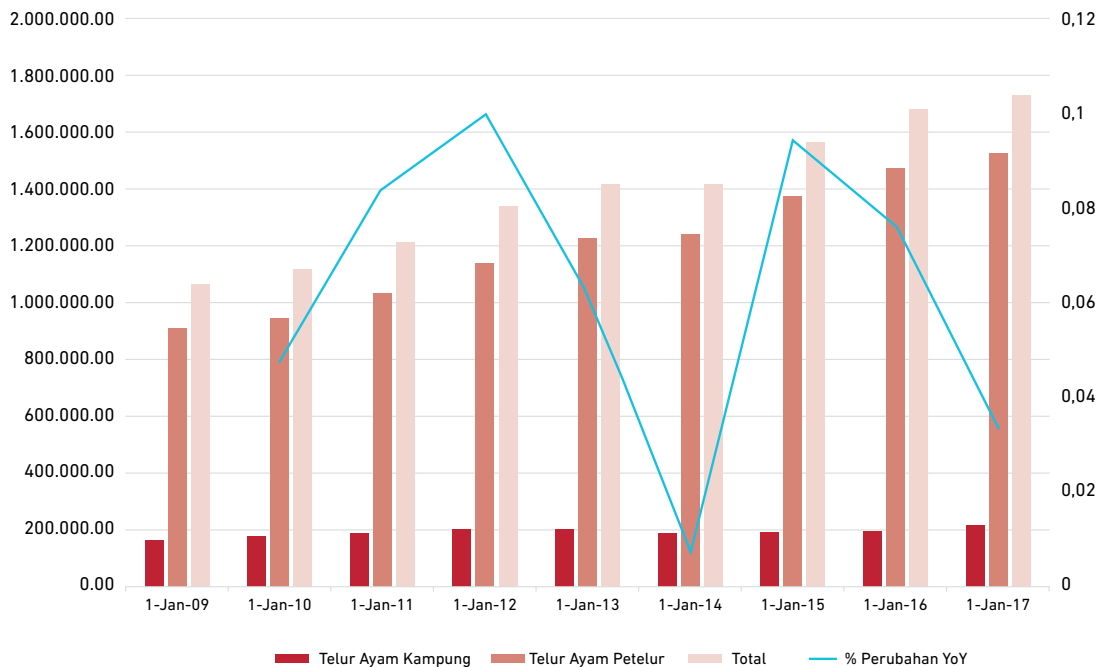
Produksi dan konsumsi ayam broiler di Indonesia (x1000 MT), 1995–2018.



Sumber: Data dari IndexMundi, dielaborasi oleh Penulis.

Dalam sepuluh tahun terakhir, produksi telur juga mengalami pertumbuhan yang kuat. Pada tahun 2009, Indonesia menghasilkan lebih dari satu juta ton telur dan pada tahun 2017, produksi mencapai 1,7 juta ton (+62,4%). Produksi telur juga menunjukkan tanda modernisasi yang jelas; produksi telur ayam kampung meningkat dari tahun 2009 hingga 2017 dari 160.920 ton menjadi 210.924 ton (+31,1%), sementara pada periode yang sama produksi telur dari ayam petelur meningkat dari 909.519 ton menjadi 1,5 juta ton (+67,9%). Antara tahun 2009 hingga 2017, total persentase telur ayam kampung menurun dari 15% menjadi 12%, sementara telur ayam petelur meningkat dari 85% menjadi 88%. Telur ayam kampung biasanya diproduksi di pertanian halaman belakang yang berukuran kecil dan telur dari ayam petelur merupakan hasil dari peternakan ayam petelur yang intensif. Kandang dari ayam petelur yang dikandangkan dapat menampung 50.000–60.000 ayam, yang dapat menghasilkan 200.000–240.000 telur per minggu (peternakan biasanya terdiri dari lebih dari satu kandang).

**Grafik 6**  
Produksi telur Indonesia, 1999-2017.



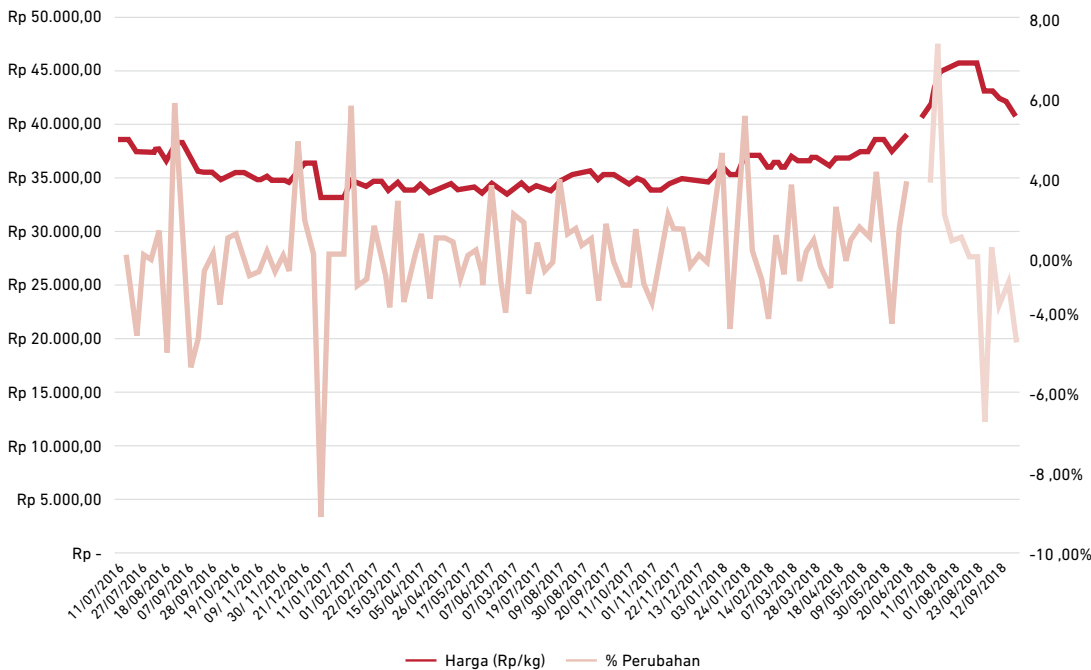
Sumber: Data dari Badan Pusat Statistik, dielaborasi oleh Penulis.

Skenario ini memengaruhi harga daging dan telur ayam broiler. Seperti yang diduga, harga komoditas dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Interaksi antara penawaran dan permintaan adalah hal yang penting, dan interaksi ini di Indonesia cukup seimbang. Tren PDB per kapita dan kondisi makro-ekonomi umum di negara ini juga penting, sebagaimana dibuktikan oleh dampak krisis keuangan Asia (1997-1998) pada produksi unggas. Risiko flu burung dan dampaknya terhadap permintaan musiman adalah faktor non-ekonomi penting yang memengaruhi industri. Akhirnya, peran ekonomi eksogen yang penting dimainkan oleh kerangka kerja kelembagaan dan secara khusus oleh peraturan pemerintah (subjek pada bagian berikutnya).

Sayangnya, tidak mudah untuk mendapatkan serangkaian data lengkap tentang harga daging dan telur ayam broiler untuk pasar Indonesia, tetapi berkat basis data PIHPS Nasional, kami dapat menelusuri fluktuasi harga mingguan selama dua tahun terakhir. Hal ini digambarkan pada Grafik 7.

**Grafik 7**

Harga daging ayam broiler di Indonesia, semua provinsi (Rp/kg), 2016–2018.



Sumber: Data dari PIHPS Nasional yang merujuk pada semua provinsi. Badan Pusat Statistik, dielaborasi oleh Penulis. Jeda pada garis dikarenakan oleh tidak adanya data untuk minggu pada tanggal 27 Juni 2018.

Harga daging ayam broiler menurun secara stabil pada seluruh paruh kedua tahun 2016, mulai dari Rp38.450/kg menjadi hampir Rp35.000/kg. Setelah periode ini dan untuk jangka waktu sekitar satu setengah tahun antara awal tahun 2017 hingga Mei 2018, harga naik antara Rp33.000/kg dan Rp36.500/kg. Harga melonjak pada bulan Juni dan Juli 2018 dan mencapai puncak harga terbaru sebesar Rp45.650/kg pada tanggal 8 Agustus (peningkatan yang mungkin sebagian terkait dengan perayaan Hari Raya, meskipun peran penting juga dimainkan oleh pasar yang menanjak).

Mulder (2018b, hlm. 11) melaporkan, “harga eceran CWT ayam broiler berkisar antara Rp35.500/kg hingga Rp39.500/kg pada bulan Mei 2018— jauh di atas harga referensi pemerintah sebesar Rp32.000/kg. [...] Kami memperkirakan harga akan menurun pada akhir Juni, karena permintaan kembali normal.” Dan memang, harga mulai menurun pada Agustus 2018. Harga terakhir yang diamati dari tanggal 26 September adalah Rp40.750/kg.

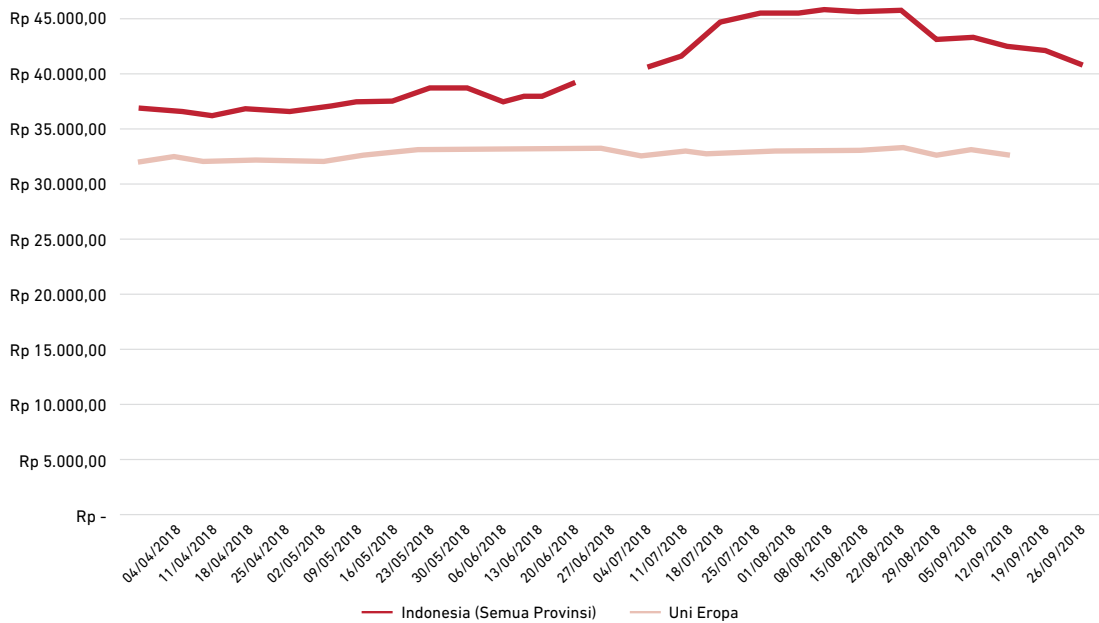
Harga rata-rata selama periode tersebut yang dijelaskan pada Grafik 7 adalah sebesar Rp35.873/kg, dengan standar deviasi sebesar Rp2.223,90/kg, 6,76% dari nilai rata-rata. Sebagai perbandingan, harga ayam broiler (CWT) di Uni Eropa (UE) antara Agustus 2017 dan Agustus 2018 naik sebesar €1,83/kg hingga €1,90/kg (Rp31.707/kg hingga Rp32.919/kg) (Komisi Eropa, 2018a). Pada periode yang sama, harga di Amerika Serikat naik antara USD1,9/ kg hingga USD2,5/kg (IDR27.973/kg hingga Rp37.587/kg) (Ycharts, 2018). Ini berarti bahwa pada puncak musim perayaan, harga ayam di Indonesia agak lebih tinggi daripada di Eropa dan Amerika Serikat. Harga rata-rata di Indonesia lebih tinggi daripada harga ‘Barat’. Harga ini agak mengejutkan mengingat biaya tenaga kerja Indonesia yang lebih rendah. Di Indonesia, biaya tenaga kerja tersebut hanya mewakili 9% dari biaya produksi dalam peternakan ayam broiler dan 16% dalam peternakan ayam petelur.

“Setelah periode ini dan untuk jangka waktu sekitar satu setengah tahun antara awal tahun 2017 hingga Mei 2018, harga naik antara Rp33.000/kg dan Rp36.500/kg. Harga melonjak pada bulan Juni dan Juli 2018 dan mencapai puncak harga terbaru sebesar Rp45.650/kg pada tanggal 8 Agustus.”

“ Ini berarti bahwa pada puncak musim perayaan, harga ayam di Indonesia agak lebih tinggi daripada di Eropa dan Amerika Serikat.”

Kami percaya bahwa peraturan mengenai impor bahan baku mentah dan infrastruktur yang buruk berperan dalam harga yang tinggi ini. Grafik 8 menunjukkan tidak hanya harga di Indonesia yang secara konsisten lebih tinggi daripada di Eropa, tetapi juga harga tersebut lebih stabil dari waktu ke waktu.

**Grafik 8**  
Harga ayam broiler di Indonesia dan UE, Maret–September 2018 (Rp/kg CWT).



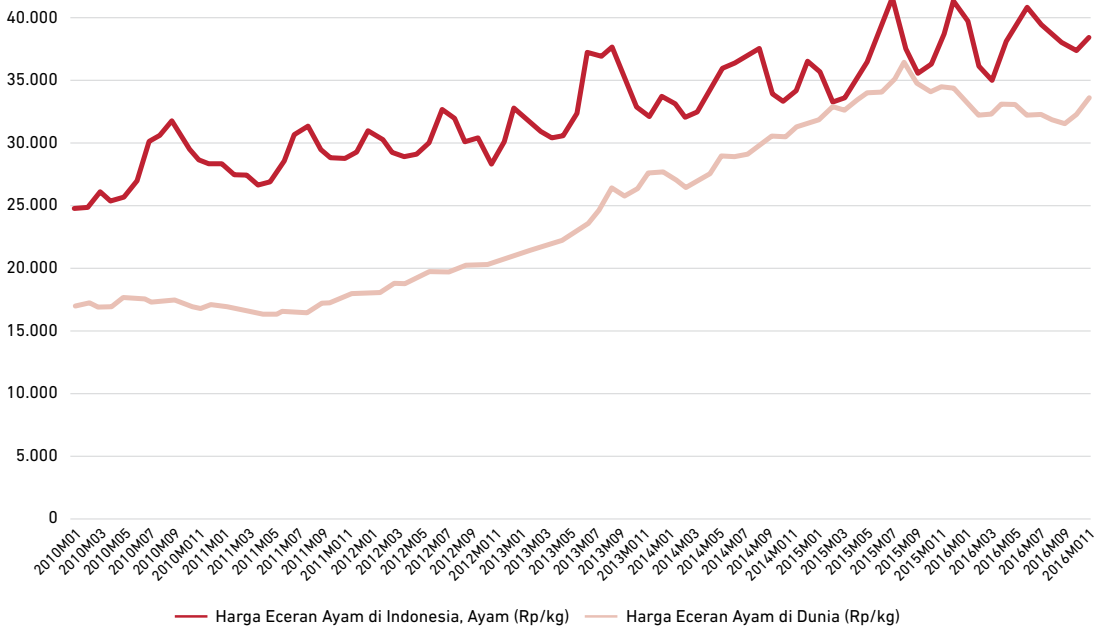
Sumber: Data dari PIHPS Nasional yang merujuk ke semua provinsi dan Komisi Eropa (2018a), dielaborasi oleh Penulis. Jeda pada garis biru dikarenakan oleh tidak adanya data untuk minggu terakhir bulan Juni 2018..

Karena data pada Grafik 8 mengacu pada bulan Maret–September 2018, rangkaian historis yang lebih panjang juga tersedia untuk membandingkan harga eceran di Indonesia dengan harga eceran dunia<sup>23</sup> antara tahun 2010 dan 2016, sebagaimana yang dijelaskan pada Grafik 9.

<sup>23</sup> Saya ingin berterima kasih kepada Assyifa Szalmi Ilman, peneliti di CIPS yang sudah memberikan saya data tersebut.

**Grafik 9**

Harga Eceran Ayam (Rp/kg), harga di Indonesia dan Dunia, 2010–2016.

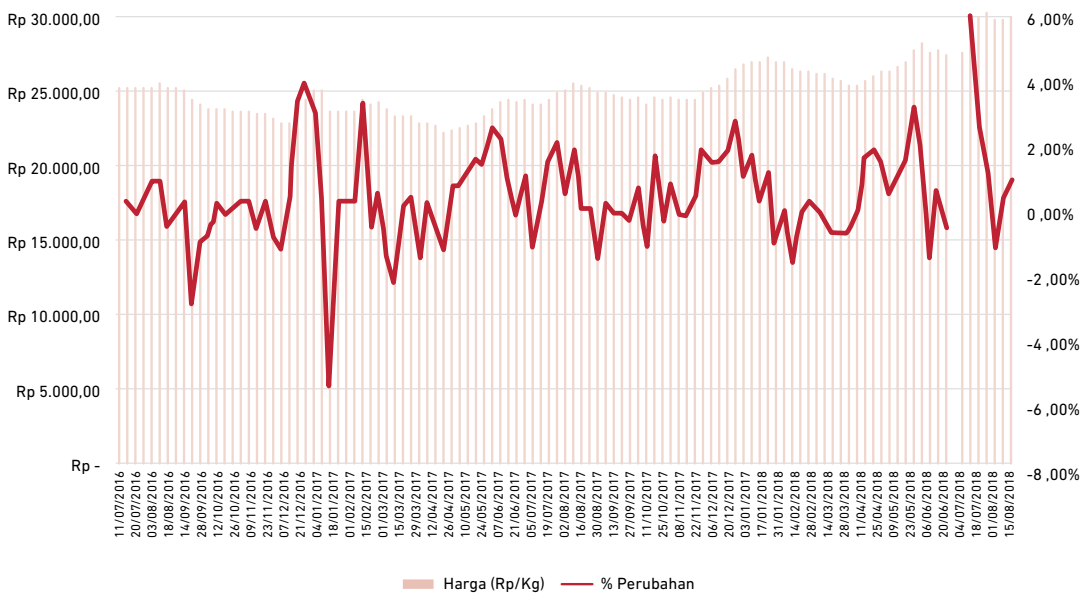


Sumber diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2010–2016) dan Bank Dunia (2010–2016).  
Penjelasan data oleh Assyifa Szalmi Ilman.

Harga telur (Grafik 10) menunjukkan dinamika yang serupa dengan harga ayam broiler (Grafik 8).

**Grafik 10**

Harga telur di Indonesia, semua provinsi (Rp/kg), 2016–2018.



Catatan: Data untuk bulan Juli 2018 tidak tersedia.  
Sumber: Penjelasan kami tentang data PIHPS Nasional yang merujuk ke semua provinsi

Keadaan ini menggambarkan bahwa telur di Indonesia cenderung lebih mahal dibandingkan dengan di Uni Eropa, terlepas dari tenaga kerja yang lebih murah di Indonesia dan pelarangan ayam petelur yang dikandangkan di Uni Eropa pada tahun 2012

Harga telur menurun selama paruh kedua tahun 2016 dan tetap berada di antara Rp22.000/kg hingga Rp25.000/kg hampir di seluruh tahun 2017. Pada tahun 2018 harga telur stabil dan berada di atas Rp25.000/kg, mencapai Rp30.100 pada tanggal 25 Juli 2018. Sama seperti harga daging ayam broiler, harga telur menurun sejak bulan Agustus dan pengamatan terbaru (26 September) menunjukkan bahwa harga telur berada pada Rp28.200/kg. Secara umum, kita dapat mengatakan bahwa fluktuasi harga tidak begitu buruk selama dua tahun terakhir, dengan pengecualian di beberapa momen 'panas' seperti Natal dan Hari Raya. Harga telur rata-rata adalah Rp35.220/kg, dengan standar deviasi sebesar Rp1.950,30/kg, 6,7% dari nilai rata-rata.

Selama setahun terakhir, harga telur di Uni Eropa mengalami fluktuasi dengan harga tertinggi pada €1,92/kg (Desember 2017) dan terendah €1,13/kg pada Agustus 2018 (Rp33.270/kg dan Rp19.580/kg) (Komisi Eropa, 2018b). Berbeda dengan pasar ayam broiler, pasar telur di Eropa lebih rentan terhadap fluktuasi harga dibandingkan dengan Indonesia. Grafik 11 menunjukkan bahwa dalam enam bulan terakhir situasi di Eropa telah stabil, dengan harga berfluktuasi sekitar Rp21.019/kg, sedangkan di Indonesia harga rata-rata mendekati Rp28.000/kg. Keadaan ini menggambarkan bahwa telur di Indonesia cenderung lebih mahal dibandingkan dengan di Uni Eropa, terlepas dari tenaga kerja yang lebih murah di Indonesia dan pelarangan ayam petelur yang dikandangkan di Uni Eropa pada tahun 2012, yang memaksa produsen Eropa untuk lebih manusiawi, tetapi metode produksi lebih mahal.<sup>24</sup>



Sumber: Penjelasan kami tentang data PIHPS Nasional yang merujuk pada semua provinsi dan Komisi Eropa (2018b).

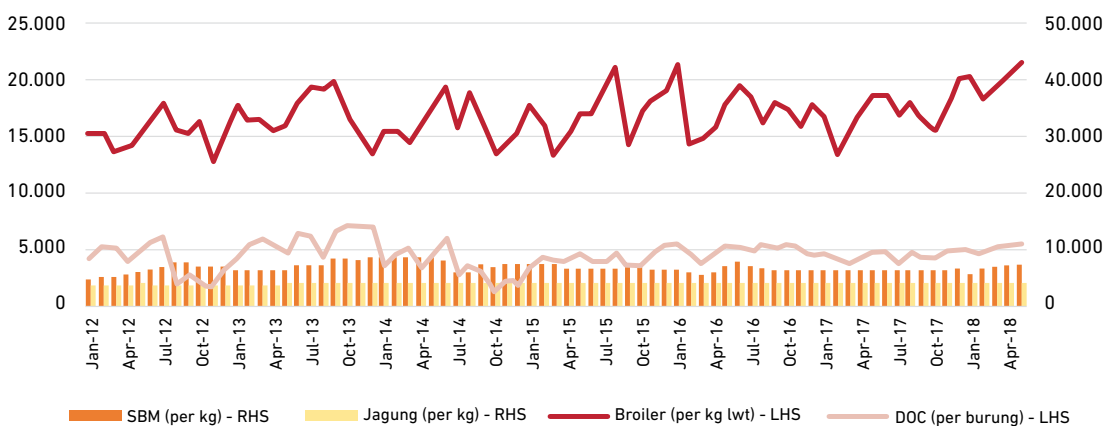
<sup>24</sup> Larangan pengandangan ayam petelur pada tahun 2012 telah disetujui oleh European Union Council Directive 1999/74/EC. Direktif ini melarang pengandangan hewan konvensional di Uni Eropa mulai 1 Januari 2012. Hanya sistem non-kandang dan kandang yang dilengkapi perabotan yang diizinkan. Kandang yang dilengkapi perabotan tersebut harus menyediakan: 750 cm<sup>2</sup> per ayam, yang merupakan kandang seluas 600 cm<sup>2</sup> dengan tinggi 45 cm untuk berkeliaran dan bergerak, 15 cm tenggeran dan 12 cm bukaan makanan per ayam dan perangkat perpendek cakar. Larangan tersebut mengharuskan tidak hanya restrukturisasi produksi telur di tingkat petani, tetapi juga produsen peralatan pengenalan terpaksa menerapkan sistem baru dan membentuk kembali proses produksi mereka.



Menurut Mulder (2018a, hlm. 11), sangat menarik untuk menganalisis harga ayam broiler pada bobot hidup mereka (LWT)<sup>25</sup> di wilayah Jawa Barat, salah satu pasar utama di Indonesia. Di wilayah ini, harga ayam broiler telah menguat sejak awal tahun 2018 (rata-rata Rp20.000/kg LWT, +20% YOY<sup>26</sup>), tetapi turun di awal Februari 2018 (Rp18.123/kg LWT) (Grafik 12). Harga ayam umur sehari (DOC) lebih stabil selama dua tahun terakhir, berfluktuasi antara Rp4.500 dan Rp5.000. Pada bulan Mei 2018, harga rata-rata ayam broiler adalah Rp21.345/kg LWT (+ 15% YOY) di pasar-pasar utama di Jawa Barat sementara harga DOC naik menjadi Rp5.300/ekor, dengan peningkatan tahunan sebesar 19%.

**Grafik 12**

Harga ayam broiler, DOC, dan bahan pakan di Indonesia, Q1 2015–Q2 2018.



Sumber: Mulder (2018b), hlm. 11.

Untuk menutup bagian ini, penting untuk memberikan perbandingan singkat tentang harga unggas di Indonesia dan di negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Data ini dijelaskan pada Tabel 1.

**Tabel 1**

Harga daging dada, daging, dan telur di Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina tahun 2016.

Negara	Harga Daging Dada (Kg)	Harga Daging (Kg)	Harga Telur (Kg)
Indonesia	42.024	30.000 - 60.000	13.200 - 22.000
Thailand	39.034	30.179 - 57.598	16.127 - 25.343
Malaysia	36.379	25.722 - 48.229	12.861 - 19.291
Vietnam	52.137	36.917 - 79.988	14.767 - 21.535
Filipina	43.983	35.282 - 52.923	17.641 - 22.983

Sumber: Wahyono dan Utami (2018), hlm. 2.

Di Thailand dan Malaysia, di mana industri daging unggas lebih berkembang (Thailand adalah salah satu eksportir teratas UE), harga daging unggas lebih murah bila dibandingkan dengan ekonomi di mana sektor ini masih tumbuh dan beroperasi dengan tingkat infrastruktur yang lebih rendah, seperti di Indonesia dan Filipina. Di Vietnam, di mana industri ini masih dalam tahap awal (konsumen Vietnam lebih suka daging babi dengan memiliki konsumsi Asia tertinggi kedua setelah Tiongkok), harga daging unggas masih jauh lebih tinggi.

<sup>25</sup> Bobot hidup adalah berat hewan hidup sebelum disembelih. Biasanya mengacu pada penawaran harga (misalnya €/kg LWT) di mana penawaran harga untuk hewan tersebut adalah per kilogram untuk hewan hidup.

<sup>26</sup> YOY = year on year.

## KEBIJAKAN SAAT INI

“Berdasarkan Pasal 9 dan 11 peraturan ini, produsen unggas tidak memiliki kebebasan untuk mengimpor ayam pengembang biak sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diharapkan. Sebaliknya, impor diatur berdasarkan perhitungan penawaran dan permintaan yang dibuat oleh tim analisis yang ditunjuk oleh pemerintah.”

Ada beberapa kebijakan yang memengaruhi produksi unggas di Indonesia, dan juga memengaruhi harga telur dan ayam di pasar. Sebagian besar kebijakan yang relevan diterapkan pada tahun 2016 dan direvisi pada tahun 2018. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 57 Tahun 2015 tentang ekspor dan impor pakan hewan berbasis tanaman, kualitas produk tidak dapat didasarkan pada standar yang disetujui secara internasional, tetapi pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Seperti yang diharapkan, pengukuran ini membuat proses impor lebih rumit.

Sementara ayam broiler dan ayam petelur diproduksi di Indonesia, jenis ayam yang berbeda dengan garis genetica khusus yang diperlukan untuk memproduksi telur akan secara khusus diimpor. Bahkan 81% unggas Indonesia memiliki cadangan genetica yang berasal dari Amerika Serikat (Wright dan Darmawan, 2017, hlm. 2). Tahapan yang berbeda dari proses pengembangbiakan tergantung pada stok buyut (GGPS), stok kakek-nenek (GPS),<sup>27</sup> dan stok induk (PS).

Di Indonesia, pemerintah terlibat dalam pengadaan GGPS, GPS, dan PS melalui Permentan Nomor 26 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 9 dan 11 peraturan ini, produsen unggas tidak memiliki kebebasan untuk mengimpor ayam pengembang biak sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diharapkan. Sebaliknya, impor diatur berdasarkan perhitungan penawaran dan permintaan yang dibuat oleh tim analisis yang ditunjuk oleh pemerintah. Tim ini terdiri atas pejabat pemerintah, akademisi, para ahli, operator pengembang biak unggas, dan peternak ayam. Tidak ada metode yang transparan untuk pemilihan anggota tim ini, jadi tidak mungkin untuk mengetahui apakah terdapat konflik kepentingan yang dapat menyebabkan perhitungan tidak akurat.

Yang juga penting adalah Permentan Nomor 34 Tahun 2016, yang mengatur impor karkas, daging, jeroan, dan/atau produk olahannya ke Indonesia. Untuk membuat semakin lebih rumit, Pasal 2 dari peraturan ini menetapkan persyaratan halal sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang secara resmi mengakui 45 badan halal Islam di 26 negara. Informasi tentang persyaratan halal hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia, yang mungkin menyulitkan para importir untuk sepenuhnya memahami persyaratannya. Ini berarti bahwa peraturan ini dapat digunakan sebagai alasan untuk memblokir impor daging ayam, seperti halnya ketika Brasil mengeluh kepada WTO tentang praktik di Indonesia pada tahun 2016.

Untuk mendapatkan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 10 dan 11, para importir memerlukan dokumen pendukung dengan masa penyelesaian setidaknya 20 hari kerja. Hal ini akan memperlambat proses impor dan membebani para importir dengan biaya dan waktu tambahan. Biaya tambahan ini kemungkinan akan diteruskan kepada konsumen, dan mendorong harga yang lebih tinggi.

<sup>27</sup> GGPS dan GPS termasuk dalam “sektor pengembangbiakan utama”, yang terdiri dari perusahaan yang membiakkan stok silsilah (“garis murni”). Telur GGPS dan GPS menetas dalam penetasan silsilah khusus. Telur-telur tersebut kemudian dikirimkan ke tempat penetasan khusus GP untuk memproduksi stok induk, yang lolos ke sektor produksi. Singkatnya, ayam broiler dan ayam petelur menetas dari telur yang berasal dari apa yang disebut pembenihan komersial, yang menerima telur dari peternak ayam induk, dari pengembangbiakan stok induk. Kemudian, PS menetas dari telur yang datang ke pembenihan GPS dari peternak pengembangbiakan kakek-nenek dan sebagainya.

“ Untuk mendapatkan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 10 dan 11, para importir memerlukan dokumen pendukung dengan masa penyelesaian setidaknya 20 hari kerja. ”

Kami sangat mempercayai bahwa peraturan terpenting yang memengaruhi industri unggas di Indonesia adalah peraturan tentang impor jagung, yang telah dianalisis secara mendalam oleh Freddy dan Kumara Gupta (2018). Permendag Nomor 21 Tahun 2018 menggantikan peraturan lama yang mengatur impor jagung, khususnya Permendag Nomor 20 Tahun 2016 dan Permendag Nomor 56 Tahun 2016. Aspek terpenting dari peraturan penting ini adalah kekuatan yang diberikan kepada BULOG.<sup>28</sup> Pasal 3 (1) dari Permendag Nomor 21 Tahun 2018 menetapkan bahwa BULOG tetap menjadi importir tunggal jagung untuk pakan ternak, termasuk untuk unggas. Peraturan ini membuat peran BULOG sangat penting dalam pengembangan semua aktivitas pertanian.

Menurut perkiraan Badan Pusat Statistik, pakan ternak unggas mewakili hampir 57% dari biaya produksi untuk ayam broiler dan hampir 72% untuk peternak ayam petelur, sedangkan upah tenaga kerja masing-masing mewakili 9% dan 16%. Angka-angka ini dapat membantu kita untuk memahami betapa pentingnya Permendag Nomor 21 Tahun 2018 bagi industri unggas. Menurut Freddy dan Kumara Gupta (2018, hlm. 7), “diperkirakan bahwa 58% dari permintaan jagung nasional adalah untuk pakan ternak, sementara 30% adalah untuk konsumsi manusia [...]. Industri unggas mengkonsumsi sekitar 87% pasokan pakan ternak.”

Berbeda dengan Permentan sebelumnya, Permentan Nomor 21 Tahun 2018 tidak memerlukan surat rekomendasi dari kementerian untuk mengesahkan impor jagung. Meskipun ini merupakan peningkatan, peraturan tersebut juga mendatangkan masalah yang potensial karena bertentangan dengan peraturan lama lainnya. Bahkan, menurut Pasal 16 Permentan Nomor 57 Tahun 2015, surat rekomendasi dari Permentan tetap menjadi dokumen yang diperlukan untuk mengimpor jagung. Selain itu, Pasal 3 (1) Permendag Nomor 21 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 4 (1) Permentan Nomor 57 tahun 2015, yang mengatur ekspor dan impor produk berbasis tanaman. Berdasarkan Permendag Nomor 21 Tahun 2018, hanya BULOG yang diperbolehkan untuk mengimpor jagung, sedangkan Permentan Nomor 57 tahun 2015, yang tidak pernah dihapus secara formal, memberikan hak impor dan ekspor kepada sektor swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kesehatan dan peternakan hewan. Kontradiksi ini menciptakan kebingungan dalam industri dan memberikan kekuasaan direksi kepada pejabat yang mengesahkan impor. Dalam skenario terburuk, otoritas pelabuhan dapat menyita jagung impor jika surat rekomendasi tidak lengkap.

<sup>28</sup> Badan Urusan Logistik adalah perusahaan milik pemerintah di Indonesia yang berurusan dengan distribusi makanan dan pengendalian harga. Lihat Yonekura (2005).

---

## ANALISIS

Dengan memahami bagaimana dan mengapa kebijakan yang dibahas di atas gagal mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan harga ayam dan telur akan sangat penting untuk bisa memahami rekomendasi kebijakan terbaik.

### Pendahuluan: Metode

Bagian ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian 4.1 (bagian 1–4) membahas tentang ikhtisar teoretis beberapa aspek penting dari proses pasar dan bagian 4.2 (bagian 1–3) menampilkan diskusi yang lebih teknis terkait akses ke beberapa bahan mentah utama.

#### 4.1.1 Penyesuaian biaya dan harga

Akan sangat penting bagi pembaca untuk tidak jatuh ke dalam perangkap pemikiran bahwa mengurangi biaya produksi adalah keputusan yang cukup untuk mendapatkan harga pasar yang lebih murah dengan cara proporsional yang secara langsung. Para ahli ekonomi bersepakat bahwa nilai barang adalah subjektif, banyak yang percaya bahwa biayanya ditentukan oleh kondisi objektif. Hal ini adalah sebuah kesalahan.

Biaya, seperti nilai, bersifat subjektif (Mitchell dan Boettke, 2017, hlm. 34-35). Biaya riil yang penting dalam keputusan ekonomi adalah biaya peluang, “nilai yang diberikan pada barang alternatif bernilai tertinggi yang harus ditolak seseorang untuk membuahakan hasil”. Biaya mengacu pada tindakan— pada pilihan—bukan pada barang, yang secara ekonomi tidak memiliki biaya. “Tidak ada biaya yang ‘objektif’. Semua biaya adalah biaya untuk seseorang yang memberikan nilai dan biaya peluang”. (Heyne, Boettke, dan Prychitko, 2014, hlm. 76-77).

Pada saat yang bersamaan, biaya peluang adalah biaya *marginal*. Sementara biaya peluang adalah nilai dari peluang yang diambil karena suatu tindakan/pilihan, biaya marginal berfokus pada perubahan dalam situasi yang ada yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut (Heyne, Boettke dan Prychitko, 2014, hlm. 79). Yang terpenting dalam pembahasan berikutnya adalah bahwa perubahan dalam biaya produksi marginal akan cenderung mengubah kurva penawaran.

Terkait rekomendasi kebijakan yang kami buat, penurunan harga faktor produksi akan menurunkan biaya marginal (yang berarti barang alternatif menjadi relatif lebih mahal), dan karena itu akan mengarah pada kurva penawaran yang berbeda, yang ditandai dengan peningkatan penawaran keseluruhan (dan tindakan alternatif menjadi lebih mahal). Kurva penawaran baru ini sesuai dengan petani yang bersedia dan mampu memberikan harga yang lebih rendah untuk produk mereka dari harga sebelumnya. (Heyne, Boettke, dan Prychitko, 2014, hlm. 84-86).

Sulit untuk memprediksi dampak *kuantitatif* dari saran kebijakan. Dampak yang baru saja kami jelaskan harus dianggap sebagai *ceteris paribus* (semua hal lain tetap sama) dan sebagai hasil dari proses penyesuaian yang terjadi *pada waktunya*. Biaya produksi bukan satu-satunya elemen yang memengaruhi pergerakan harga. Biaya produksi ini tunduk pada berbagai faktor yang jauh lebih luas; oleh karena itu, perubahan penawaran *kuantitatif* dan pengurangan harga akibat perubahan kebijakan yang kami sarankan tidak dapat diprediksi. Pertimbangan teoretis ini adalah *kunci interpretatif* yang diperlukan untuk memungkinkan para ahli ekonomi memahami

realitas dalam pengamatan. Data tidak objektif—mereka memerlukan interpretasi (Mitchell dan Boettke, 2017, hlm. 12; Huerta de Soto, 2000, hlm. 72-73; Mises, 1957).

#### 4.1.2 Masalah informasi dan pengetahuan

Sebuah diskusi terperinci tentang aspek-aspek penting dari kebijakan yang ada membutuhkan pemahaman tentang beberapa argumen umum terkait mengapa perencanaan pusat, pada umumnya, bukan merupakan solusi untuk pembangunan ekonomi. Bahkan jika upaya untuk memusatkan impor stok induk<sup>29</sup> dan bahan pakan ternak seperti jagung dilakukan dengan tujuan untuk mencapai pengembangan pasar yang ideal, solusi tersebut akan gagal untuk mengenali kesulitan yang tersirat dalam perencanaan terpusat, yang dapat dirangkum sebagai penghitungan (Mises, 1920) dan masalah pengetahuan (Hayek, 1937, 1945)<sup>30</sup>.

Individu, ketika melakukan tindakan manusia sebagai perilaku yang memiliki tujuan, menetapkan tujuan berdasarkan harapan mereka. Setelah mendefinisikan tujuan mereka, sarana untuk mencapainya harus dipilih melalui proses yang berkembang seiring waktu. Mencapai tujuan tertentu harus melibatkan biaya yang timbul dari persepsi subjektif dari peluang yang diambil untuk mencapai tujuan lain (sebagaimana dibahas di atas). Harapan dalam tindakan yang diambil adalah manfaat subjektif untuk mencapai tujuan akan lebih tinggi daripada biaya. Konsep *laba kewirausahaan* terletak pada perbedaan antara biaya dan manfaat ini.

Kirzner (1973, p. 14) mendefinisikan wirausaha sebagai individu spesial, yang “mampu melihat peluang untuk laba kewirausahaan; artinya, mereka dapat melihat di mana barang dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari harga yang dapat dibeli”. Karena *kewirausahaan* adalah *kewaspadaan* terhadap peluang laba yang berasal dari ketidaktahuan pasar, dan proses pasar adalah serangkaian revisi yang mengikuti modifikasi pengetahuan, kedua konsep tersebut secara intrinsik terikat.

Dalam sistem yang direncanakan secara terpusat, otoritas pusat berusaha mengumpulkan informasi yang diperlukan dari setiap individu, dan mengklaim mampu menyediakan semua informasi mengenai harga, barang yang diproduksi, berapa banyak, dan seterusnya. Namun, sifat dari informasi yang diperlukan seseorang untuk membuat pilihan yang harus dilakukan dalam tindakan ekonomi akan membuat perencana pusat tidak berhasil mengumpulkan dan mendistribusikan informasi suara. Informasi yang dibutuhkan adalah, berdasarkan sifatnya, diam-diam dan tidak diartikulasikan, tersebar di dalam pikiran individu, dan selalu berubah seiring waktu.

Di antara para ahli ekonomi, terdapat sebuah upaya untuk meniru metode ilmu fisika, dengan kemungkinan prediksi yang tepat (Hayek, 1974), tetapi upaya ini mengasumsikan ketidakmungkinan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Selain itu, dengan kemungkinan badan pemerintah memiliki pengetahuan teknis/ilmiah (cara untuk melakukan sesuatu), akan mustahil untuk mengumpulkan pengetahuan kewirausahaan yang didasarkan pada intuisi (yang tidak pasti) bahwa untuk melakukan sesuatu di suatu tempat dapat menghasilkan sebuah keuntungan. Hal ini adalah intisari dari masalah pengetahuan.

<sup>29</sup> Mulai sekarang, kami menggunakan ungkapan sintesis ‘stok induk’ untuk merujuk ke semua level yang berbeda dari proses pengembangbiakan seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

<sup>30</sup> Lihat juga Lavoie (1985a, 1985b), Huerta de Soto (1992), dan Ferlito (2013, Bab 4).

### 4.1.3 Masalah penghitungan dan kondisi pasar

Bahkan jika masalah pengetahuan dapat diatasi dan informasi ini dapat dikumpulkan, masalah penghitungan akan tetap ada. Masalah penghitungan menyebabkan kekhawatiran terhadap proses interaksi formasi harga sebagai interaksi antara evaluasi subjektif dari waktu ke waktu.

Kompetisi adalah proses penemuan (lihat Hayek, 1946 dan 1968). Proses interaksi antara pemasok yang bersaing dan juga konsumen yang bersaing sebagai pelaku pasar harus dianggap sebagai proses yang berkelanjutan dalam mencari koordinasi bersama dari rencana yang terus berubah (dan tidak bisa diprediksi) dan bukan poin objektif yang tepat (Shackle, 1972, hlm.76-79; Lachmann, 1976, hlm.56).

Dengan demikian, pasar bukanlah sebuah barang atau tempat, tetapi proses di mana tujuan dan rencana individu terjadi dan cenderung mengarah ke koordinasi melalui pertukaran informasi berkelanjutan yang memungkinkan dan dapat dipahami, berkat institusi bersama. Para ahli ekonomi dapat menginterpretasikan dan memahami proses ini, tetapi mereka tidak bisa memberikan panduan atau prediksi. Hasil dari proses pasar sudah teratur, meskipun tidak ada yang bertugas untuk mengaturnya. Hal itu merupakan "hasil dari tindakan manusia, tetapi bukan pelaksanaan dari rancangan manusia manapun" (Ferguson, 1782).

Untuk alasan ini, tindakan kewirausahaan dapat mendatangkan keputusan yang terbaik jika berada di bawah rezim pasar bebas, yang direvisi untuk menanggapi persaingan dan perubahan kondisi dalam proses penemuan dinamis yang tersirat dalam proses pasar. Peningkatan pembuatan keputusan kewirausahaan dapat membantu proses produksi lebih efektif. Laba datang kepada pengusaha yang bijak (yang pilihan strateginya dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang lebih rendah) dan merugikan pengusaha dengan keputusan yang tidak matang serta tidak efisien. Penyintasan dan konsolidasi pengusaha dan perusahaan yang lebih baik hanya mungkin terjadi jika pengusaha mampu mendapatkan sesuatu dari persaingan dengan menawarkan produk yang lebih baik atau harga yang lebih murah.

Harga muncul dari semua interaksi antara evaluasi subjektif pengusaha dan konsumen dalam proses pasar. Tanpa pasar, harga yang baik tidak akan ada, maka semua pertimbangan terkait kesuksesan dan kegagalan sebuah usaha tidak mungkin terjadi.

### 4.1.4 Hukum keunggulan komparatif

Untuk dapat mengerti alasan untuk lebih memilih spesialisasi perdagangan internasional, seseorang harus memahami keunggulan komparatif, yang dikembangkan 200 tahun yang lalu oleh David Ricardo (1817, bab 7).<sup>31</sup> Menurut hukum ini, sebuah negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi sebuah barang apabila barang tersebut dapat diproduksi dengan biaya peluang yang relatif lebih rendah daripada di pasar lain. Mengacu pada Rothbard (1995, hlm.94-95), "negara harus menguasai keunggulannya dan apa yang membuat mereka sangat efisien, kemudian tukarkan produk unggul tersebut, dengan demikian rakyat di kedua negara akan mendapatkan keuntungan."

Ricardo juga membahas bahwa perlindungan biasanya diminta oleh produsen domestik (seperti pada kasus produsen jagung di Indonesia). Meskipun produsen dan pemerintah dapat menyatakan bahwa negara miskin atau berkembang akan termarjinalkan untuk dapat menjaga perlindungan

<sup>31</sup> Ricardo mengembangkan hal yang sudah dijelaskan oleh William Spence pada tahun 1807.

dagang, upaya perlindungan ini berarti bahwa konsumen dan industri akan kehilangan keuntungan dalam perdagangan internasional, dan seperti yang sudah dibahas di atas, semua keputusan pasar dipengaruhi oleh interferensi. “[Hukum keunggulan komparatif] berarti bahwa bahkan jika sebuah negara dalam keadaan miskin sehingga tidak memiliki keuntungan sama sekali dalam memproduksi barang apa pun, mereka masih harus membayar mitra dagangnya, rakyat di negara lain, untuk memungkinkan mereka memproduksi sebuah barang yang sedikit lebih baik” (Rothbard, 1995, hlm. 95).

#### 4.2.1 Impor stok induk

Masalah penghitungan dan pengetahuan membantu menjelaskan kekhawatiran kita tentang Permentan Nomor 26 Tahun 2016 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2018, dan juga menunjukkan masalah dengan Permentan Nomor 57 Tahun 2015 (mengenai ekspor dan impor pakan ternak berbasis tanaman).<sup>32</sup> Seperti yang disebutkan di atas, Pasal 9 dan 11 Permentan Nomor 26 Tahun 2016, produsen unggas tidak memiliki kebebasan untuk mengimpor ayam pengembang biak sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diharapkan oleh mereka. Sebaliknya, impor diatur berdasarkan penghitungan penawaran dan permintaan yang diterapkan oleh tim analisis pemerintah.

Tujuan dari Permentan Nomor 26 Tahun 2016 adalah untuk menentukan di awal, melalui sekelompok ‘ahli’, kebutuhan pasar objektif untuk stok induk, atau dengan kata lain, untuk memberikan stimulasi di atas kertas, dan dinamika permintaan dan penawaran supaya dapat menentukan titik ekuilibrium pasar. Bahkan jika kita tidak memperhitungkan kemungkinan konflik kepentingan dalam tim pemerintah, masalah pengetahuan dan penghitungan berarti para ahli akan gagal untuk memprediksi hasil dari pasar (Koppl, 2018).

Secara singkat, usaha pemerintah untuk menetapkan rencana pengontrolan perilaku permintaan dan penawaran akan selalu gagal karena proses pasar hanya dapat diinterpretasikan dan tidak bisa diarahkan atau diprediksi dari luar pasar itu sendiri. Rencana yang baik hanya dapat diterapkan oleh individu yang berpartisipasi dalam proses pasar, yang menjadi satu-satunya institusi yang menyediakan alat untuk memastikan informasi dapat diperoleh, diinterpretasikan, dan ditransmisikan di antara individu. Proses penemuan tidak akan pernah berhenti dan akan selalu menggerakkan tujuan dan rencana, demikian juga revisinya akan berfungsi sama, sehingga dapat meningkatkan tingkat kecocokan bersama dengan rencana yang sudah dibuat.

Sejauh ini, meskipun tidak sempurna, pasar telah terbukti menjadi sistem terbaik untuk menghadirkan konsistensi yang muncul sebagai aturan spontan—hasil dari tindakan manusia, tetapi bukan rancangan manusia.

#### 4.2.2 Peran jagung

Argumen yang sama bisa digunakan untuk melawan monopoli BULOG dalam impor produk pakan ternak, khususnya jagung. Freddy dan Kumara Gupta (2018) telah memberikan analisis yang baik mengenai pasar jagung di Indonesia. Seperti sudah didiskusikan sebelumnya, Permendag Nomor 21 Tahun 2018 menjelaskan bahwa surat rekomendasi dari Kementan tidak dibutuhkan untuk dapat mengimpor jagung, tetapi menurut Pasal 16 dan 22 Permentan Nomor 57 Tahun

<sup>32</sup> Sebuah pengingat bahwa menurut Pasal 14 peraturan ini, kualitas produk tidak dapat didasarkan pada standar internasional yang sudah diakui, tetapi harus berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), yang membuat proses impor menjadi semakin rumit..

2015, surat rekomendasi dari Kementan tetap dibutuhkan untuk mengimpor jagung. Selain itu, Pasal 3 (1) Permendag Nomor 21 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 4 (2) Permentan Nomor 57 Tahun 2015 mengenai apakah hanya BULOG yang diizinkan untuk mengimpor jagung untuk pakan ternak. Kontradiksi ini tidak hanya membuat kebingungan dalam industri, tetapi dalam skenario terburuk dapat berakibat penyitaan jagung impor. Kontradiksi ini menciptakan kekuatan arbitrase ke tangan petugas pelabuhan, yang sangat sulit (bahkan tidak mungkin) untuk ditebak.

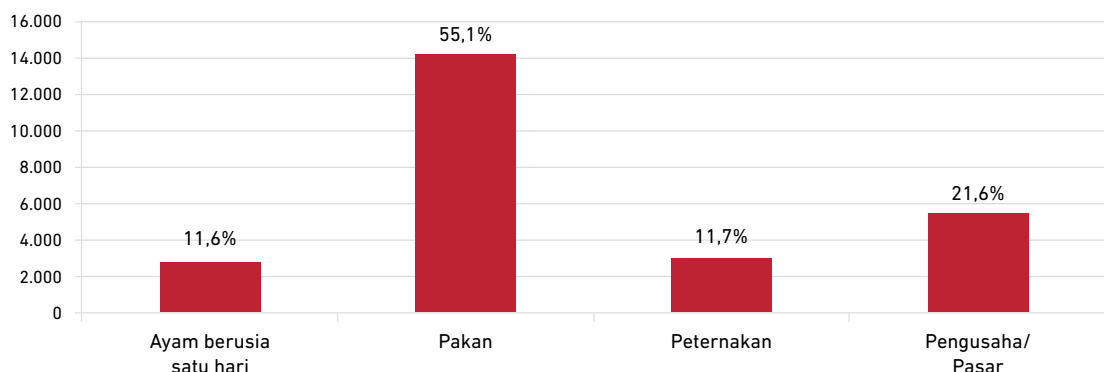
Pentingnya jagung bagi industri ayam tidak dapat disepelekan. Mengingat pakan mewakili hampir 57% biaya produksi pada peternakan ayam broiler dan hampir 72% pada peternakan ayam petelur, dan 58% dari permintaan nasional untuk jagung diperuntukkan bagi pakan<sup>33</sup> ternak, sementara 30% adalah untuk konsumsi manusia dan industri ayam mengkonsumsi sekitar 87% dari pakan ternak tersebut (Badan Pusat Statistik dan Freddy dan Kumara Gupta (2018, hlm. 7)).

“**Pentingnya jagung bagi industri ayam tidak dapat disepelekan.**”

Mengacu kepada Dr. Vijaya Kumar, kita mengetahui bahwa 50 kg karung pakan ayam broiler mengandung 7,2 kg jagung dan 11,9 kg kecambah jagung dan sekarung 50 kg pakan ayam broiler awal (1-4 minggu) mengandung 28,6 kg jagung (Kumara, tanpa tanggal). Sekarung 70 kg pakan bubuk petelur (untuk unggas lebih dari usia 18 minggu) memiliki 24,3 kg jagung dan 7,1 kg dedak jagung. Klaim ini didukung oleh angka yang diberikan oleh USAID (2013), yang menjelaskan (hlm.16) bahwa pakan ternak mewakili 55,1% dari total biaya rantai produksi (Grafik 13).

**Grafik 13**

Penjelasan biaya rantai produksi ayam broiler hingga ke konsumen (Rp/kg dari bobot karkas dan sebagai persentase total biaya oleh sub-sektor di dalam rantai tersebut).



Sumber: USAID (2013), hlm. 16.

<sup>33</sup> Untuk menghindari kebingungan, perlu diklarifikasi bahwa yang dimaksud dengan 'ternak' di sini adalah hewan ternak darat.



Peran penting jagung diperjelas lagi oleh tingginya ketergantungan terhadap produksi luar negeri (Tabel 2).

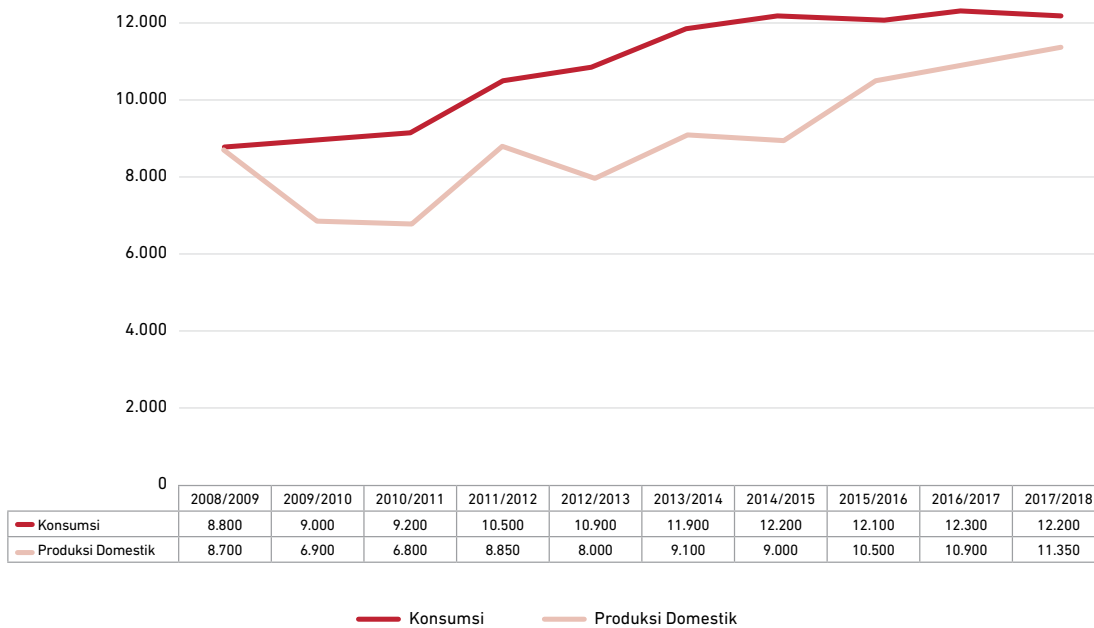
**Tabel 2**  
Volume dan nilai impor untuk pakan ayam broiler dan ayam petelur.

	Volume Impor	Nilai Impor	Nilai Impor Protein
Pakan ayam broiler	76%	69%	85%
Pakan ayam petelur	73%	57%	60%

Sumber: USAID (2013), hlm. 32.

Ketergantungan kepada produksi luar negeri membuat penawaran industri rentan terhadap fluktuasi mata uang. Pemerintah optimis dengan produksi domestik dan Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, mendeklarasikan bahwa Indonesia telah berswasembada di tahun 2017 (Asian Poultry Magazine, 2018b, hlm.3). Akan tetapi, menurut data resmi, terlepas dari meningkatnya produksi lokal, konsumsi telah berkembang lebih cepat dan Indonesia tidak mencapai swasembada. Data ini digambarkan pada Grafik 14.

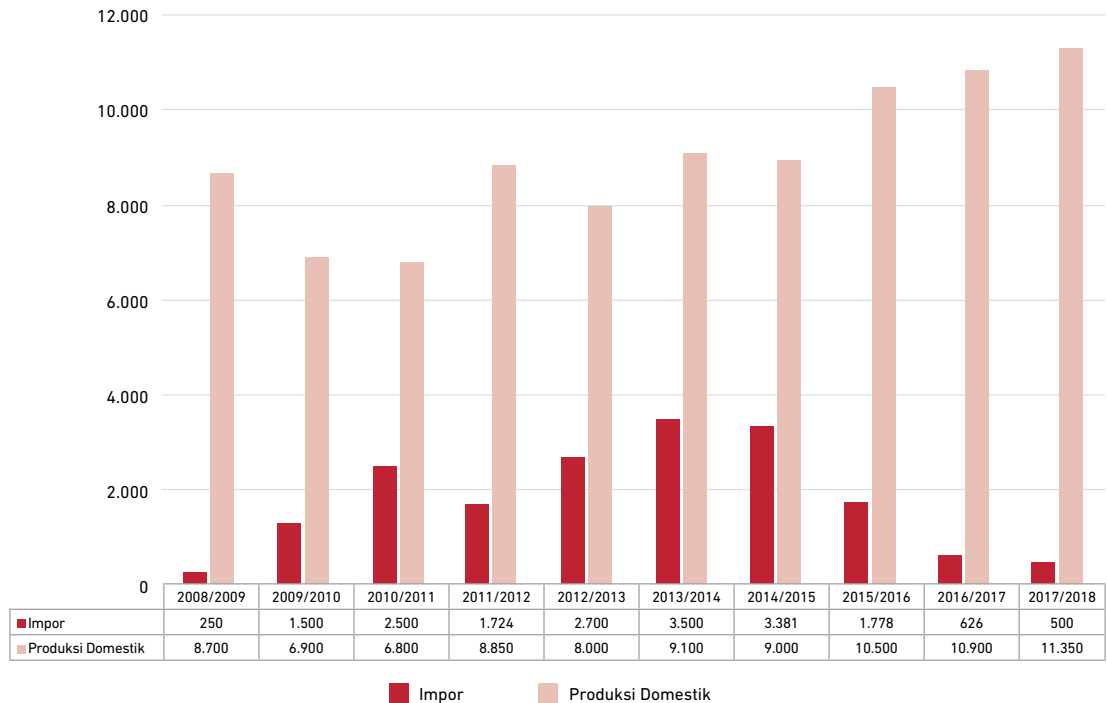
**Grafik 14**  
Produksi dan Konsumsi Jagung Indonesia, 2008-2018.



Setengah juta jagung diimpor pada tahun 2017 (tidak cukup untuk memenuhi permintaan domestik), tetapi pemerintah mengklaim telah siap untuk mengekspor jumlah tersebut pada tahun 2018 (Grafik 15).

**Grafik 15**

Impor dan produksi domestik Jagung Indonesia, 2008-2018.

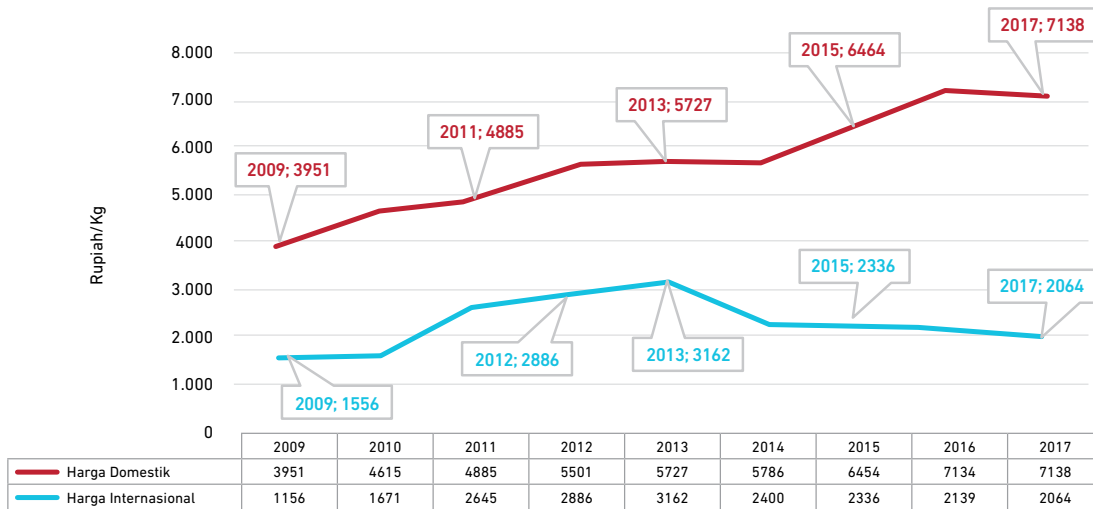


Sumber: USDA Grain and Feed Annual Report.

Meskipun target pemerintah sangat jelas, masalahnya bukan pada swasembada. Dalam ekonomi global, perdagangan internasional dapat mengisi kekurangan pada produksi domestik dan bisa jadi impor adalah solusi yang lebih baik daripada prinsip autarkis 'melakukannya sendiri' yang sepertinya telah menginspirasi kebijakan Indonesia akhir-akhir ini. Respatiadi dan Nabila (2017) telah memperluas argumen ini dalam konteks impor daging sapi dan produksi. Kekuatan perdagangan dan hukum keunggulan komparatif (Cowen dan Tabarrok, 2015, Bab 2) tidak dapat ditaksir terlalu tinggi.

Grafik 16 menunjukkan bahwa harga jagung internasional jauh lebih murah daripada harga domestik Indonesia. Selama lebih dari 10 tahun, harga jagung internasional telah menunjukkan dinamika perputaran tertentu dan menurun sejak angka tertingginya di tahun 2013, harga di Indonesia secara terus menerus tetap naik. Kenaikan harga di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh tekanan permintaan yang konstan dan juga pembatasan impor. Efek tekanan permintaan dapat dimitigasi dengan masuknya jagung impor jika kebijakan yang berlaku memperbolehkan impor sesuai dengan kondisi pasar dan bukan pada pertimbangan politik yang dimotivasi oleh keinginan autarkis.

**Grafik 16**  
Perbandingan Harga Jagung Pasar Domestik dan Internasional, 2009 -2017.



Sumber: Freddy dan Kumara Gupta (2018), hlm.9.

Tabel 3 menjelaskan bagaimana kuota kecil impor yang diperbolehkan membuat harga tetap tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

**Tabel 3**  
Konsumsi jagung impor dan domestik di Asia Tenggara (2018).

Negara	Impor Jagung (Ton)	Konsumsi Domestik (Ton)++	% Impor dari Jumlah Konsumsi Domestik	Harga Domestik (Rp/kg)
Korea Selatan*	10.200.000	10.211.760	99,9%	4.178
Thailand**	250.040	4.820.230	5,2%	3.031
Vietnam***	8.917.120	14.208.480	62,8%	3.198
Tiongkok****	5.000.000	219.230.140	2,3%	3.122
Mexico*****	16.700.000	38.005.290	43,9%	3.909
Indonesia+	500.000	23.300.000	2,1%	7.138

\*: Agricensus (2018)

\*\* : Bank Thailand (2018)

\*\*\*: diolah dari USDA (2018b)

\*\*\*\*: Ren (2018)

\*\*\*\*\*: FAO (2018)

+: USDA (2018a)

++: OECD-FAO Agricultural Outlook (2018)

Sumber: Freddy dan Kumara Gupta (2018), hlm.9.

Bagian sebelumnya telah menelaah peraturan seputar jagung, yang kebanyakan dikategorikan berdasarkan dua faktor: peraturan yang rumit dan kontradiktif serta monopoli impor oleh BULOG. Monopoli pemerintah melalui BULOG tidak berdampak baik bagi harga unggas. Monopoli tersebut membuat penggunaan dan penemuan pengetahuan kewirausahaan serta proses pasar tidak memungkinkan. Selain itu, karena BULOG adalah badan pemerintahan, maka secara alami juga bergantung pada pertimbangan politik daripada kebutuhan pasar yang sesungguhnya. Berdasarkan karakteristik pasar ini, kita mengharapkan harga akan menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya.

“Total pengeluaran sebuah perusahaan di Indonesia diserap oleh biaya logistik, sementara dalam kalangan ekonomi angkanya seharusnya di bawah 10%. Perbedaan seperti itu dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Di saat yang bersamaan, masalah logistik membuat pengusaha yang sudah ada sulit untuk memperluas bisnis mereka dan membatasi potensi mereka.”

Harga jagung mendukung klaim ini. Meskipun harga pakan internasional tetap lebih rendah daripada harga di Indonesia, pemerintah tetap mengejar target politiknya untuk menjadi swasembada meskipun pada kenyataannya hal tersebut justru menyebabkan biaya produksi menjadi lebih tinggi di beberapa industri. Hasil akhir dari strategi ini adalah harga konsumen tetap tinggi, sehingga merugikan orang-orang terutama dengan daya beli rendah. Oleh karena itu, pendekatan autarkis seakan terinspirasi oleh kepentingan nasional. Kepentingan tersebutlah yang dirusak dengan memaksa orang untuk membeli ayam dengan harga yang tinggi dan bukan dengan kemungkinan yang akan terjadi jika impor bahan baku mentah dibebaskan.

#### 4.2.3 Beban dari kurangnya infrastruktur

Poin terakhir yang ingin kami bahas dan juga yang akan memberikan rekomendasi kebijakan di bab berikutnya adalah terkait dengan masalah infrastruktur di Indonesia yang tidak memadai dan dampaknya terhadap industri unggas. Secara spesifik, infrastruktur pelabuhan dan jalan raya yang menghubungkan kota-kota tidak memadai.

Andersson dan Andersson (2008, hlm.1) baru-baru ini berargumentasi bahwa “kinerja sistem ekonomi manapun tergantung pada infrastrukturnya, karena infrastruktur berubah pada tempo yang lebih lambat daripada faktor terkait lainnya” dan mereka juga menambahkan bahwa “infrastruktur material terdiri atas jaringan untuk menyampaikan informasi dan energi atau untuk memindahkan barang dan manusia” (hlm.2). Bahkan jika kondisi infrastruktur membaik, terutama di Jakarta, tetap sudah menjadi rahasia publik bahwa Indonesia tidak memiliki infrastruktur yang memadai.

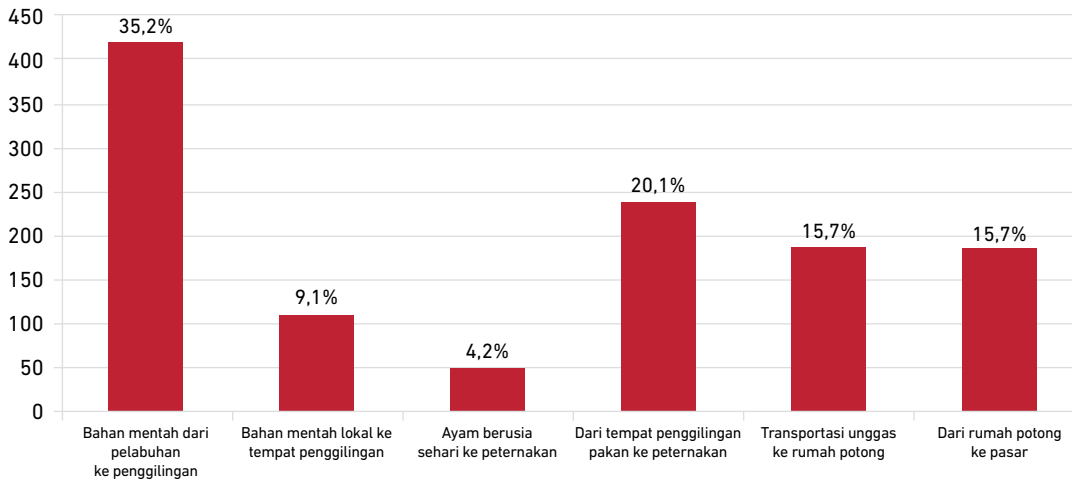
Diperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar USD157 miliar untuk memenuhi rencana infrastruktur lima tahun Presiden Jokowi. Berdasarkan rencana ini, hanya USD15 miliar datang dari pemerintah, sementara sisanya diharapkan datang dari investor swasta dan internasional (Salna, 2018; baca juga Oxford Business Group, 2017).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin Indonesia), sekitar 17% total pengeluaran sebuah perusahaan di Indonesia diserap oleh biaya logistik, sementara dalam kalangan ekonomi angkanya seharusnya di bawah 10%. Perbedaan seperti itu dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia (terutama dalam kasus penanaman modal asing). Di saat yang bersamaan, masalah logistik membuat pengusaha yang sudah ada sulit untuk memperluas bisnis mereka dan membatasi potensi mereka (Indonesia Investments, 2017).

Dalam industri unggas, biaya transportasi diperkirakan sebesar 4,7% dari harga eceran ayam broiler (USAID, 2013, hlm.21). Masalah ini terkait dengan impor bahan mentah (dianalisis di bab sebelumnya). Dalam hal bahan mentah impor, biaya transportasi pakan ternak dari pelabuhan ke peternakan bisa mencapai 35% dari total biaya transportasi. Seperti yang ditekankan oleh USAID (2013, hlm.21), biaya ini tergolong tinggi untuk berbagai alasan, termasuk tingginya bahan baku pakan unggas di Indonesia (75% dari bahan mentah pakan ayam broiler adalah impor), fasilitas penanganan di pelabuhan yang tidak efisien (tidak cukupnya tempat berlabuh di Jakarta), besarnya biaya berlabuh akibat lambatnya pergerakan kapal pengangkut, waktu transportasi yang lama dari pelabuhan ke peternakan, dan terakhir adalah jumlah truk yang lebih banyak untuk menjalankan proses ini.

**Grafik 17**

Biaya transportasi untuk ayam broiler hingga ke konsumen di Indonesia.

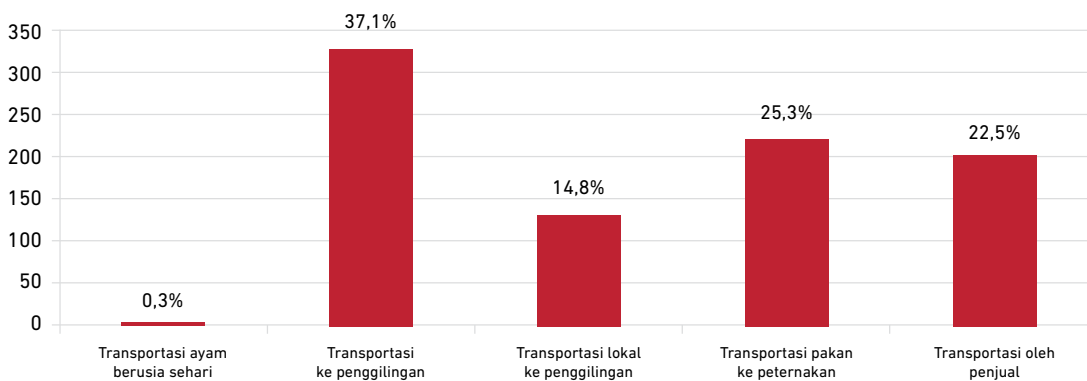


Sumber: USAID (2013), hlm. 21.

Situasi yang mirip juga berimbas pada pasar telur. Transportasi sebesar 5,1% dari harga eceran telur. Serupa dengan kasus sebelumnya, biaya transportasi tertinggi disebabkan oleh bahan mentah impor yang harus dibawa dari pelabuhan ke pabrik pakan ternak.

**Grafik 18**

Biaya transportasi untuk produksi telur di Indonesia.



Sumber: USAID (2013), hlm. 22.

Situasi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa fasilitas peternakan unggas tidak berlokasi di kota-kota besar atau di sekitar pelabuhan. Mereka berada di daerah pedesaan, yang hanya dapat dijangkau setelah berjam-jam perjalanan dengan truk.

Untuk memahami bagaimana masalah infrastruktur memengaruhi khususnya operasional peternakan unggas, dengan mempertimbangkan bahwa, misalnya, silo penyimpanan pakan ternak yang biasanya tidak digunakan di peternakan unggas di Indonesia karena tidak memungkinkan untuk memindahkan mereka ke peternakan dengan kondisi jalan yang ada saat ini. Silo penyimpanan pakan ternak untuk peternakan unggas biasanya bervariasi dari kapasitas tiga metrik ton hingga 100 metrik ton, dengan diameter dari 1,5 hingga 5 meter dan tinggi dari 3 hingga 12 meter, dan truk khusus yang tidak didukung kondisi jalanan di Indonesia akan

Situasi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa fasilitas peternakan unggas tidak berlokasi di kota-kota besar atau di sekitar pelabuhan.

---

dibutuhkan untuk memindahkan mereka. Alih-alih, peternakan membuat gerobak-gerobak kecil, yang secara manual kemudian ditarik oleh para pekerja.

Dalam lima minggu, ayam broiler mengkonsumsi pakan sekitar 3,3 kg (untuk bobot rata-rata 2 kg) (Akinbobola, tanpa tanggal). Kandang ayam broiler pada umumnya (dan sebuah peternakan biasanya terdiri dari beberapa kandang) dapat menampung hingga 25.000 unggas, maka konsumsi akan mencapai sekitar 81,7 ton pakan dalam lima minggu, atau 2,3 ton per hari. Berdasarkan sumber yang sama, konsumsi pakan kumulatif ayam petelur yang berusia lebih dari 42 minggu adalah 4,7 kg. Untuk kandang ayam petelur yang menampung 50.000 unggas, maka diperlukan 232,8 ton dalam 42 minggu, atau 0,791 ton per hari. Mengingat volume pakan yang dibutuhkan, sangat jelas bahwa sistem ini hanya dapat berjalan selama biaya tenaga kerja tetap rendah—seperti dijelaskan di atas, Badan Pusat Statistik memperkirakan bahwa upah mewakili masing-masing 9% dan 16% biaya produksi pada peternakan ayam broiler dan ayam petelur.

Peningkatan infrastruktur akan memberikan beberapa keuntungan pada harga akhir ayam dan telur. Tidak hanya dampak biaya transportasi yang harus dikurangi, menurunkan biaya produksi, tetapi juga jalan raya yang lebih baik bisa memberikan akses transportasi peralatan khusus seperti silo penyimpanan pakan.

Infrastruktur harus diperhitungkan juga dari perspektif yang lebih umum. Tabel 4 menunjukkan tingkatan kondisi ideal peternakan unggas terkait dengan pengangkutan dan transportasi ayam dari pembiakkan ke peternakan dan dari peternakan ke rumah potong.

**Tabel 4**

Standar kondisi peternakan unggas terkait dengan pengangkutan dan transportasi ayam.

Pengangkutan dan Transportasi	
Semua ayam, termasuk anak ayam, yang dipilih untuk ditransportasikan harus diperiksa oleh orang yang berwenang sebelum diangkut untuk memastikan mereka dalam kondisi yang sehat dan dapat bertahan di perjalanan tanpa mengalami rasa sakit maupun stres yang tidak berasal dan tidak perlu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua ayam dalam kondisi fit dan sehat ketika ditransportasikan dan tidak menunjukkan cedera dari buruknya proses menangkap dan memasukkan ke kendaraan angkut.</li> <li>• Anak ayam diantarkan ke tempat di mana mereka akan langsung dirawat secepatnya setelah penetasan.</li> <li>• Ada dokumentasi yang menunjukkan ayam yang cedera atau mati ketika tiba di tujuan.</li> <li>• Ayam ditransportasikan dalam posisi duduk tegak.</li> <li>• Ventilasi dan jumlah tumpukan saat pemindahan dikontrol sesuai dengan cuaca dan kondisi ayam (antara lain berat, kesehatan dan status bulu).</li> <li>• Tidak ada tanda dan bukti sulit bernapas, meringkuk dan gemetar pada ayam.</li> <li>• Ada dokumentasi pelatihan untuk kru pengangkutan dan transportasi.</li> <li>• Dokumentasi rencana cadangan bisa dibuktikan.</li> </ul>
Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan dan transportasi ayam harus dilatih dengan hati-hati dalam menjalankan prosedur dan mengerti efek dari kondisi buruk transportasi terhadap kondisi ayam.	
Wadah pengangkut dan kontainer harus memiliki ventilasi yang cukup, bahkan ketika berhenti, untuk mencegah pengumpulan gas atau penguapan cairan yang berbahaya, dan untuk melindungi ayam dari kondisi iklim yang bisa mengganggu kondisi mereka.	
Rencana cadangan harus ada untuk mengatasi potensi masalah transportasi.	
Pengemudi kendaraan harus diberikan pengarahan yang benar mengenai rencana cadangan.	
Pakan tidak boleh tidak diberikan kepada ayam lebih dari 12 jam menjelang keberangkatan di pabrik pemrosesan.	
Ayam berusia sehari harus ditempatkan dan ditransportasikan dalam kondisi temperatur dan aliran udara yang terkontrol.	
Krat dan kontainer dengan ayam harus ditangani dengan hati-hati dan jangan sampai terlempar atau terjatuh.	
Ayam yang terluka saat prosedur penetasan dan pengangkutan harus dibunuh secara wajar segera.	
Wadah pengangkut dan kontainer harus memiliki ventilasi yang cukup untuk mengizinkan aliran udara bebas bagi ayam, bahkan ketika berhenti. Hal ini untuk mencegah terjadinya pengumpulan konsentrasi gas atau penguapan cairan atau temperatur yang berbahaya.	

Sumber: Phillips (2018), hlm. 39. Hal ini telah dianggap sebagai saran manajemen umum dan bukan peraturan wajib.

“Transportasi ayam dari pembiakan ke peternakan dan dari peternakan ke rumah potong harus dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan unggas.”

---

Transportasi ayam dari pembiakan ke peternakan dan dari peternakan ke rumah potong harus dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan unggas. Karena kondisi dan keamanan unggas sangat penting, dalam peternakan unggas, ayam juga mewakili barang modal utama dalam produksi. Kerusakan atau luka di badan unggas menunjukkan kerusakan pada produk, demikian juga kerusakan pada sumber pendapatan utama. Kondisi jalan yang buruk dapat membahayakan unggas dan mengurangi kualitas dagingnya. Selain itu, seperti yang disebutkan pada Tabel 4, anak ayam harus dikirim ke tempat di mana mereka langsung dirawat secepatnya setelah penetasan. Oleh karena itu, infrastruktur yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan akses unggas terhadap pakan dan air.

Seperti yang dijelaskan oleh Bergoug et al. (2013, hlm. 3301), Undang-Undang Uni Eropa menyatakan bahwa anak ayam broiler dapat ditransportasikan maksimum 24 jam tanpa mendapatkan pakan atau air paling lama 72 jam setelah penetasan. Standar ini berdasarkan pada fakta bahwa metabolisme anak ayam dapat menyimpan cadangan makanan dan minuman hingga tiga hari. Minggu pertama kehidupan unggas adalah bagian paling krusial dari hidup seekor anak ayam berumur satu hari (DOC). Risiko kematian lebih tinggi dalam periode ini dan dapat meningkat karena kombinasi stres dari penanganan pasca penetasan di pembiakan, *transportasi*, dan adaptasi yang buruk terhadap kondisi yang berubah (Bayliss dan Hinton, 1990).



## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pertimbangan topik dalam laporan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia. Bagian ini menekankan empat poin tindakan: harmonisasi peraturan, pembebasan impor stok induk, pembebasan impor jagung, dan peningkatan infrastruktur.

### 5.1. Harmonisasi peraturan

Pada bagian sebelumnya, laporan ini mendiskusikan kontradiksi antara peraturan impor jagung. Harmonisasi peraturan yang berlaku saat ini dengan menghapuskan kontradiksi antara Permendag Nomor 21 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 57 Tahun 2015 sangatlah penting untuk membantu importir menghindari kebingungan dan mengurangi kekuasaan terselubung dalam proses impor yang dapat berimbas pada lancarnya perkembangan industri ini.

Pemerintah harus menghapuskan persyaratan surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian seperti yang diatur dalam Permentan Nomor 57 Tahun 2015 Pasal 16 untuk dapat mempercepat proses lisensi impor.

### 5.2. Pembebasan impor stok induk

Laporan ini telah membahas bahwa kebanyakan ayam pengembang biak yang memberikan garis genetica untuk ayam broiler dan ayam petelur adalah hasil impor. Berdasarkan Pasal 9 dan 11 Permentan Nomor 26 Tahun 2016, produsen unggas tidak memiliki kebebasan untuk mengimpor ayam pengembang biak sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diharapkan. Sebaliknya, impor diatur berdasarkan penghitungan penawaran dan permintaan yang dibuat oleh tim analisis yang ditunjuk oleh pemerintah.

Interaksi antara permintaan dan penawaran adalah proses dinamis yang berubah setiap saat. Hal tersebut berdasarkan pada penemuan, interpretasi, pemrosesan, dan pertukaran informasi. Para ahli dapat mengamati hasil dari proses pasar sebagai pola koordinasi yang muncul, tetapi mereka tidak dapat mengontrolnya.

Hasil akhir proses pasar yang dikeluarkan dari mandat berdasarkan perhitungan pemerintah akan menjadi organisasi yang lebih baik dari rantai nilai unggas, yang diikuti oleh penurunan harga karena persaingan dan pengurangan biaya akibat (berkat penerapan metode produksi yang lebih agar dapat memenangkan persaingan pasar).

Di bawah rezim perdagangan bebas, keputusan impor ayam pengembang biak akan dibuat oleh para pemain di industri unggas. Oleh karena itu, akan didasarkan pada ekspektasi laba dan penghitungan bisnis. Untuk memungkinkan hal ini terjadi, pemerintah harus menghapuskan bagian dari Permentan Nomor 26 Tahun 2016 (Pasal 9 dan 11) yang mengilegalkan produsen swasta untuk mengimpor stok induk.

“Harmonisasi peraturan yang berlaku saat ini dengan menghapuskan kontradiksi antara Permendag Nomor 21 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 57 Tahun 2015 sangatlah penting untuk membantu importir menghindari kebingungan dan mengurangi kekuasaan terselubung dalam proses impor yang dapat berimbas pada lancarnya perkembangan industri ini.”

Pemerintah harusnya membebaskan impor jagung di Indonesia melalui revisi pada Permendag Nomor 21 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 57 Tahun 2015. Hal ini memungkinkan Indonesia mampu menjadi ahli produksi komoditas yang dapat dilakukan lebih efisien.

### 5.3. Pembebasan impor jagung

Argumen pada bagian 5.2 dapat diperluas hingga impor jagung, dan industri jagung Indonesia harus terbuka bagi pasar internasional. Selain argumen untuk stok induk, yang juga dapat diterapkan untuk pasar jagung, undang-undang keunggulan komparatif menjelaskan mengapa Indonesia dan mitra dagangnya akan diuntungkan dari pasar jagung yang terbuka.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, produsen ayam Indonesia secara virtual membayar harga dua kali lipat dari harga yang harus mereka bayarkan untuk salah satu bahan mentah mereka. Secara otomatis biaya tambahan ini direfleksikan dalam harga pasar ayam dan telur, dan hal ini membatasi baik kemungkinan konsumsi domestik maupun perluasan industri yang lebih lanjut. Selain itu, karena ayam adalah sumber protein utama di Indonesia,<sup>34</sup> harga yang lebih mahal tentu saja menyulitkan terutama bagi populasi yang berpendapatan rendah.

Pemerintah harusnya membebaskan impor jagung di Indonesia melalui revisi pada Permendag Nomor 21 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 57 Tahun 2015. Hal ini memungkinkan Indonesia mampu menjadi ahli produksi komoditas yang dapat dilakukan lebih efisien. Indonesia jelas tidak memiliki keuntungan perbandingan dalam hal produksi jagung dan dapat mengimpornya dengan harga lebih rendah. Hal ini akan menurunkan biaya produksi ayam, menguntungkan tidak hanya pihak produsen ayam tetapi juga bagi konsumen, terutama konsumen yang berpenghasilan rendah, dengan menyediakan ayam dan telur yang lebih murah.

Menghapuskan proteksi perdagangan untuk jagung juga memungkinkan Indonesia untuk memodernisasi industri ayam, menjadi lebih efisien dan mungkin mengembangkan keunggulan komparatif di masa depan, secara potensial mengubah Indonesia menjadi eksportir ayam, meningkatkan kesempatan bisnis, dan membuat keuntungan di pasar tenaga kerja.

### 5.4 Peningkatan infrastruktur

Meskipun pasar unggas di Indonesia akan diuntungkan dari penghapusan interferensi pemerintah dalam pembebasan perdagangan terkait elemen strategi seperti stok induk dan pakan ternak, kita dapat melihat peran pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah bagian strategis dari sebuah perkembangan kerangka kerja yang berhasil. Laporan ini telah mendiskusikan alasan bahwa transportasi adalah elemen penting dalam total biaya produksi untuk ayam dan telur, dan bahwa biaya transportasi paling intensif muncul di antara pelabuhan dan pabrik pakan.

Pemerintah harus berinvestasi untuk meningkatkan akses jalan raya, dengan fokus untuk menghubungkan pelabuhan dengan area pertanian terdekat. Hal ini secara langsung dapat menguntungkan proses produksi yang memungkinkan penurunan biaya transportasi. Infrastruktur transportasi yang lebih baik juga dapat memungkinkan pergerakan alat berat yang dapat membantu peternak unggas Indonesia menjadi lebih modern dan membuat mereka dapat menanggulangi kenaikan upah dengan lebih baik. Hal ini dapat membuat proses produksi lebih efisien dan dengan demikian harga menjadi lebih baik.

<sup>34</sup> Antara 86-87% total konsumsi daging adalah daging ayam (Santoso, 2016, hlm. 5).

## REFERENSI

- Akinbobola, A. (n.d.), *Broiler Feed Intake and Weight/Growth Chart*, "Livestocking.net", <https://www.livestocking.net/estimated-growth-feed-consumption-rates-broiler>.
- Alonzo, A. (2016), *Foreign firms dominate Indonesian broiler production*, "Poultry International", October, pp. 24-27.
- Andersson, D.E., and Andersson, Å.E. (2018), *Phase transitions as a cause of economic development*, "Environment and Planning A: Economy and Space", 23 September, <https://doi.org/10.1177/0308518X18803112>, pp. 1-17.
- Anonymous (2018a), *Indonesian poultry integrators in expansion mode*, "Asian Poultry Magazine", August, pp. 2-3.
- Anonymous (2018b), *Indonesia targets 500,000 tonnes of corn exports*, "Asian Poultry Magazine", August, pp. 4-5.
- Bayliss, P.A., and Hinton M.H. (1990), *Transportation of broilers with special reference to mortality rates*, "Applied Animal Behaviour Science", 28, pp. 93-118, [https://doi.org/10.1016/0168-1591\(90\)90048-l](https://doi.org/10.1016/0168-1591(90)90048-l).
- Bergoug, H., et al. (2013), *Effect of transportation duration of 1-day-old chicks on postplacement production performances and pododermatitis of broilers up to slaughter age*, "Poultry Science", 92, 12, pp. 3300-3309, <https://doi.org/10.3382/ps.2013-03118>.
- Brockotter, F. (2017), *Ventilation in the poultry house makes a world of difference*, "PoultryWorld.net", 19 August, <https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2017/8/Ventilation-in-the-poultry-house-makes-a-world-of-difference-173187E/>.
- Collins, L.M. (2007), *The Role of the Intensive Poultry Production Industry in the Spread of Avian Influenza. A report by Compassion in World Farming February 2007*, Godalming, UK, Compassion in World Farming.
- Conway, A. (2017), *Poultry meat production up 13 million metric tons by 2026*, in *WATT Executive Guide to World Poultry Trend 2017*, Rockford, IL, Watt, pp. 22-29.
- Cowen, T., and Tabarrok, A. (2015), *Modern Principles: Microeconomics*, New York, NY, Worth Publishers.
- European Commission (2018a), *Poultry meat market presentations and prices*, [https://ec.europa.eu/agriculture/poultry/presentations\\_en](https://ec.europa.eu/agriculture/poultry/presentations_en).
- European Commission (2018b), *Egg market presentations and prices*, [https://ec.europa.eu/agriculture/eggs/presentations\\_en](https://ec.europa.eu/agriculture/eggs/presentations_en).
- Fachrudin, A. (2018), *ULU eyes exports to Southeast Asia*, "Asian Poultry Magazine", August, pp. 14-17.
- Ferguson, A. (1782), *An Essay on the History of Civil Society*, <https://oll.libertyfund.org/titles/ferguson-an-essay-on-the-history-of-civil-society>.
- Ferlito, C. (2013), *Phoenix Economics. From Crisis to Renaissance*, New York, Nova Science Publishers.

- Freddy, I.M., and Kumara Gupta, G.E. (2018), *Strengthening Food Security Policy: Reforms on Hybrid Maize Seeds Delivery Mechanism*, Jakarta, Center for Indonesian Policy Studies.
- Haberler, G. (1936), *The Theory of International Trade*, London, William Hodge.
- Heyne, P.L., Boettke, P.J., and Prychitko, D.L. (2014), *The Economic Way of Thinking*, Harlow, Pearson Education Limited.
- von Hayek, F.A. (1937), *Economics and Knowledge*, "Economica", 4, 13, pp. 33-54.
- von Hayek, F.A. (1945), *The Use of Knowledge in Society*, "American Economic Review", 35, 4, pp. 519-530.
- von Hayek, F.A. (1946) [1948], *The Meaning of Competition*, in *Individualism and Economic Order*, Chicago, IL, The University of Chicago Press, pp. 92-106.
- von Hayek, F.A. (1968) [2002], *Competition as a Discovery Procedure*, "The Quarterly Journal of Austrian Economics", 5, 3, pp. 9-23.
- von Hayek, F.A. (1974), *The Pretence of Knowledge*, Friedrich A. Hayek's Nobel Prize Lecture delivered at the ceremony awarding him the Nobel Prize in economics in Stockholm, Sweden, December 11, 1974, <https://mises.org/library/pretense-knowledge>.
- Huerta de Soto, J. (1992) [2010], *Socialism, Economic Calculation and Entrepreneurship*, Cheltenham and Northampton, Edward Elgar.
- Huerta de Soto, J. (2000) [2008], *The Austrian School. Market Order and Entrepreneurial Creativity*, Cheltenham and Northampton, Edward Elgar.
- Indonesia Investments (2017), *Infrastructure Development in Indonesia*, "Indonesia-Investments.com", 23 June, <https://www.indonesia-investments.com/business/risks/infrastructure/item381?>
- Iowa Economic Development Authority (2013), *Poultry Sector in Southeast Asia*, Singapore, Orissa International.
- Kirzner, I.M. (1973), *Competition and entrepreneurship*, Chicago, IL, University of Chicago Press.
- Koppl, R. (2018), *Expert Failure*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Kumar, V. (n.d.), *Poultry Feed Formulation*, "Lybrate.com", <https://www.lybrate.com/topic/poultry-feed-formulation/229085e4e7ee77c39d6248d860cfb805>.
- Lachmann, L.M. (1976), *From Mises to Shackle: An Essay on Austrian Economics and the Kaleidic Society*, "Journal of Economic Literature", 14, 1, pp. 54-62.
- Lavoie, D. (1985a) [2015], *Rivalry and Central Planning: The Socialist Calculation Debate Reconsidered*, Arlington, VA, Mercatus Center.
- Lavoie, D. (1985b) [2016], *National Economic Planning: What is Left?*, Arlington, VA, Mercatus Center.
- McKay (2008), *The genetics of modern commercial poultry*, in *Proceedings of the 23<sup>rd</sup> World Poultry Congress*, Brisbane, Australia.
- von Mises, L. (1920) [1990], *Economic Calculation in the Socialist Commonwealth*, Auburn, AL, Ludwig von Mises Institute.

- von Mises, L. (1957) [2007], *Theory and History. An Interpretation of Social and Economic Evolution*, Auburn, AL, Ludwig von Mises Institute.
- Mitchell, M.D., and Boettke, P.J. (2017), *Applied Mainline Economics. Bridging the Gap between Theory and Public Policy*, Arlington, VA, Mercatus Center.
- Mulder, N.-D. (2018a), *Poultry Quarterly Q2 2018*, Amsterdam, Rabobank.
- Mulder, N.-D. (2018b), *Poultry Quarterly Q3 2018*, Amsterdam, Rabobank.
- Mulder, N.-D., Kumar, P., and van Horne, P. (2015), *Indonesian Poultry industry towards 2025. Long term perspective on the Indonesia poultry value chain*, Jakarta, Rabobank.
- Oxford Business Group (2017), Infrastructure key to Indonesia's development, in *The Report Indonesia 2018*, <https://oxfordbusinessgroup.com/overview/structurally-committed-pushing-forward-key-area-development>.
- Partners, R. (2017a), *PT Charoen Pokphand Indonesia: Largest And Fully-Integrated Poultry Producer In Indonesia*, "SeekingAlpha.com", 10 May, <https://seekingalpha.com/article/4071591-pt-charoen-pokphand-indonesia-largest-fully-integrated-poultry-producer-indonesia>.
- Partners, R. (2017b), *Malindo Feedmill: Turnaround Not Reflected In Share Price*, "SeekingAlpha.com", 17 April, <https://seekingalpha.com/article/4062719-malindo-feedmill-turnaround-reflected-share-price>.
- Phillips, C. (2018), *Asean poultry welfare standards*, "Asian Poultry Magazine", September, pp. 30-39.
- Respatiadi, H., and Nabila, H. (2017), *Beefing Up the Stock: Policy Reform to Lower Beef Price in Indonesia*, Jakarta, Center for Indonesian Policy Studies.
- Ricardo, D. (1817) [2001], *On the Principles of Political Economy and Taxation*, Kitchener, Batoche Books.
- Rothbard, M.N. (1995) [2006], *An Austrian Perspective on the History of Economic Thought*, Volume ii: *Classical Economics*, Auburn, AL, Ludwig von Mises Institute.
- Salna, K. (2018), *Indonesia Needs \$157 Billion for Infrastructure Plan*, "Bloomberg.com", 26 January, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-25/indonesia-seeks-to-plug-157-billion-gap-in-nation-building-plan>.
- Saptana and Rusastra, I.W. (2001), *Dampak Krisis Moneter dan Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing Agribisnis Ayam Ras Pedaging di Jawa Barat*, "Journal of Socioeconomics of Agriculture and Agribusiness", 1, 1, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/3986>.
- Santoso, B. (2016), *Indonesia's Growing Appetite for Animal Protein. An Overview of Business Models, Opportunities and Strategies*, DBS Asian Insights, Sector Briefing 21.
- Shackle, G.L.S. (1972) [2009], *Epistemics and Economics: A Critique of Economic Doctrines*, New Brunswick and London, Transaction Publishers.
- So-hiun, K. (2013), *CJ rises as beacon of Korean food, shopping, pop culture*, "Korea Herald", 4 March, <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130304000759>.
- Sulistiyono, A.G. (2016), *Cargill, Japfa create joint venture in poultry business*, "The Jakarta Post", 21 September, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/21/cargill-japfa-create-joint-venture-in-poultry-business.html>.

---

USAID (2013), *Indonesia's Poultry Value Chain. Costs, Margins, Prices, and Other Issues*, Nathan Associates Inc.

Varian, H.R. (2010), *Intermediate Microeconomics. A Modern Approach*, New York, W.W. Norton & Company.

Wahyono, N.D., and Utami, M.M.D. (2018), *A Review of the Poultry Meat Production Industry for Food Safety in Indonesia*, "Journal of Physics: Conference Series", 953, doi:10.1088/1742-6596/953/1/012125.

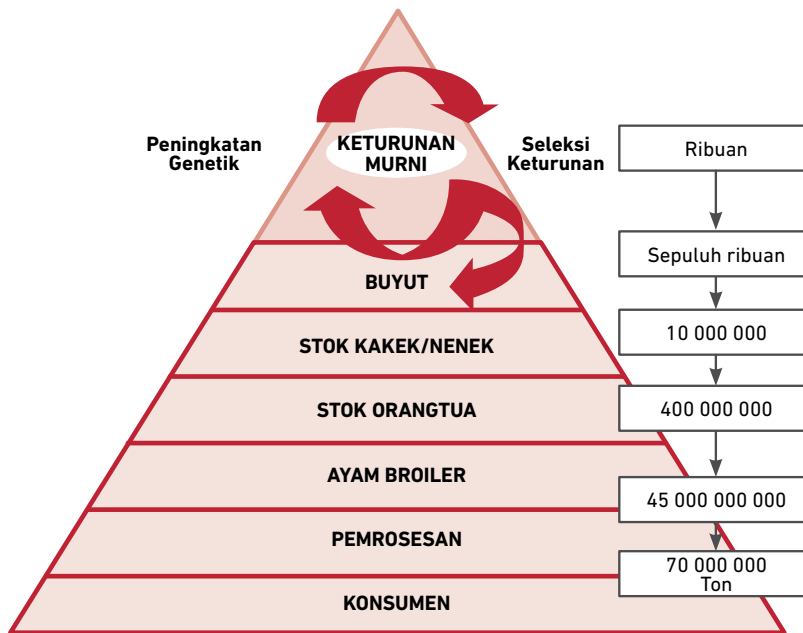
Wright, T., and Darmawan, B. (2017), *Voluntary Poultry Report*, gain Report 1701.

Ycharts (2018), *US Chicken Wholesale Price*, [https://ycharts.com/indicators/us\\_chicken\\_wholesale\\_price\\_georgia\\_dock](https://ycharts.com/indicators/us_chicken_wholesale_price_georgia_dock).

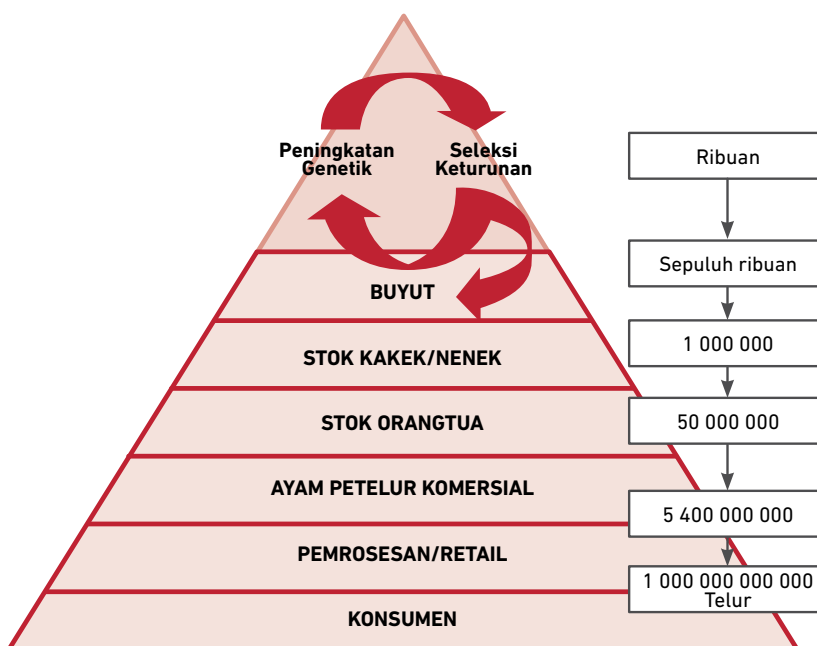
Yonekura, H. (2015), *Institutional Reform in Indonesia's Food Security Sector: the Transformation of BULOG into a Public Corporation*, "The Developing Economies", XLIII, 1, pp. 121-148.

# LAMPIRAN

**Gambar 1A**  
Struktur Industri Ayam Broiler menurut McKay (2008).



**Gambar 2A**  
Struktur Industri Ayam Petelur menurut McKay (2008).



## TENTANG PENULIS

**Carmelo Ferlito** (Verona, Italia, 1978) adalah seorang Rekan Senior di *Institute for Democracy and Economic Affairs* (IDEAS) di Kuala Lumpur dan Anggota Fakultas Tambahan di *INTI International College Subang* di Subang Jaya, di mana Carmelo mengajar *History of Economic Thought* dan *Microeconomic Theory Policy*.

Carmelo memperoleh gelar Master Ekonomi (2003) dan Ph.D. dalam Sejarah Ekonomi (2007) dari Universitas Verona di Italia. Dari 2004 sampai 2009, Carmelo bekerja sebagai peneliti dengan beberapa universitas di Italia, termasuk Universitas Verona, Universitas Salento, dan Universitas Macerata. Pada tahun 2017, Carmelo merupakan Peneliti Tamu di Universitas Bergamo.

Kegiatan penelitiannya dikhususkan untuk memperluas proses pasar ke ekonomi, dengan referensi spesifik pada analisis siklus bisnis, teori modal, dan kewirausahaan.

Dr Ferlito merupakan penulis dari 5 buku dan lebih dari 30 makalah ilmiah. Buku terbarunya adalah *Hermeneutics of Capital. A Post-Austrian Theory for a Kaleidic World* (Hauppauge, NY, 2016) dan *Phoenix Economics. From Crisis to Renascence* (New York, 2013).

Carmelo Ferlito bukan hanya seorang akademisi. Dalam 10 tahun terakhir, Carmelo mengembangkan latar belakang bisnis yang kuat, bekerja di Asia Tenggara meningkatkan bisnis regional untuk perusahaan multinasional memproduksi peralatan untuk industri unggas.

Kegiatan penelitiannya dapat diikuti dalam laman berikut: <https://carmeloferlito.academia.edu/>.

**Hizkia Respatiadi** adalah Kepala Bidang Penelitian di *Center for Indonesian Policy Studies*. Bidang risetnya meliputi sejumlah kebijakan publik yang terkait dengan fokus CIPS di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hizkia saat ini memimpin proyek 'Mewujudkan Harga Pangan yang Terjangkau bagi Keluarga Pra-Sejahtera' yang bertujuan untuk menurunkan harga bahan pokok di Indonesia dengan cara mereduksi hambatan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya.

Sebelum berkarir bersama CIPS, Hizkia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Luar Negeri RI. Pengalaman internasionalnya meliputi penempatan di Kedutaan Besar RI di Zimbabwe, dan beberapa penugasan singkat di Inggris dan sejumlah negara lain di Asia dan Afrika.

## TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

**Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)** merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.



### FOKUS AREA CIPS:

**Kebijakan Perdagangan Pangan:** CIPS memaparkan keterkaitan antara pembatasan perdagangan, harga pangan, serta pemenuhan nutrisi bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

**Pendidikan:** CIPS meneliti kuantitas dan kualitas sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah dan apakah mereka dapat memenuhi kebutuhan para orang tua murid secara lebih baik ketimbang sekolah-sekolah negeri.

**Kesejahteraan masyarakat:** CIPS mengkaji berbagai macam bidang yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga. Bidang penelitian ini berfokus pada hak akses dan pengelolaan (*property rights*), kesehatan masyarakat dalam konteks regulasi pelarangan alkohol, dan migrasi Tenaga Kerja Indonesia.

[www.cips-indonesia.org](http://www.cips-indonesia.org)

 [facebook.com/cips.indonesia](https://facebook.com/cips.indonesia)  
 [@cips\\_id](https://twitter.com/cips_id)  
 [@cips\\_id](https://www.instagram.com/cips_id)

Grand Wijaya Center Blok F-59  
Jalan Wijaya II  
Jakarta Selatan 12160